



2022

# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**  
JALAN KAPAS NO 10 YOGYAKARTA TELP (0274) 586563



<http://pn-yogyakarta.go.id/>



PN Yogyakarta



@pnjogja



PN Yogya

# PIMPINAN



**MUH. DJAUHAR SETYADI, S.H., M.H.**  
KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA



**MUJIONO, S.H., M.H.**  
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA



**ABDUL KADIR RUMODAR, S.H**  
PANITERA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA



**TASIMAN, S.H., M.H**  
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA Tahun 2022.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA ini adalah penyampaian hasil pertanggung jawaban mengenai program kegiatan dan pelaksanaan kinerja selama Tahun Anggaran 2022. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini kami susun berdasarkan surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada Bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan), Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2876/SEK/OT.01.2/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta W13.U/3267/OT.01.2/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022.

Pelaksanaan kegiatan dan program kerja serta inovasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 akan kami laporkan pada masing-masing bagian. Mulai dari Kebijakan Umum Peradilan, Visi dan Misi serta Rencana Strategis (Renstra), Keadaan Penyelesaian Perkara, Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana dan Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik dan Pengawasan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini. Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang disusun ini disadari jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan baik menyangkut materi maupun penyajiannya, oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran-saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan kinerja dan laporan yang akan datang. Semoga dengan tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini akan menjadi pedoman untuk perbaikan kinerja pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA.

Pengadilan Negeri Yogyakarta,  
Ketua



M. H. Disuhar Setyadi, S.H., M.H.  
NIP. 196502031992122001

## DAFTAR ISI

A.	KEBIJAKAN UMUM PERADILAN.....	3
B.	VISI dan MISI.....	7
C.	RENCANA STRATEGIS (RENSTRA).....	7
D.	PEROLEHAN PENGHARGAAN.....	8
E.	KEGIATAN PENGADILAN.....	11
BAB II KEADAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA.....		31
A.	KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA.....	31
B.	AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN).....	48
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA.....		51
A.	SUMBER DAYA MANUSIA.....	51
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI.....		63
A.	PENGELOLAAN KEUANGAN DIPA.....	63
B.	PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA.....	68
C.	PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA.....	73
D.	PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	76
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....		84
A.	AKREDITASI PENJAMINAN MUTU.....	84
B.	REFORMASI BIROKRASI.....	85
C.	ZONA INTEGRITAS.....	85
D.	PILOT PROJECT RAMAH KAUM RENTAN / DISABILITAS.....	86
E.	EVALUASI PELAYANAN PUBLIK.....	92
F.	POSBAKUM.....	92
G.	INOVASI & KREATIVITAS PELAYANAN.....	93
I.	INOVASI PROSES.....	93
II.	INOVASI PELAYANAN.....	108
III.	INOVASI SISTEM.....	113
BAB IV PENGAWASAN.....		122
A.	PENGAWASAN INTERNAL.....	122
B.	EVALUASI INTERNAL.....	122
C.	EVALUASI EKSTERNAL.....	126
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....		127
A.	KESIMPULAN :.....	127
B.	REKOMENDASI :.....	127

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA adalah instansi vertikal dari Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan.

Sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 diperlukan adanya usaha dan kerja keras untuk mewujudkan sebuah Badan Peradilan yang Agung dengan:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan Agenda Pembaruannya, maka di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA mempunyai program prioritas yang harus dilaksanakan, antara lain:

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Dengan adanya SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan maka pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA juga telah membuat website Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dengan alamat : [www.pn-yogyakarta.go.id](http://www.pn-yogyakarta.go.id).

Program Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan telah dapat memberikan kemudahan mendapatkan informasi kepada masyarakat pencari keadilan, baik pada website maupun administrasi di pengadilan.

Untuk mempermudah dan mempercepat proses pelayanan, Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA telah mengimplementasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dimana telah diimplementasikan aplikasi PTSP dari Dirjen Badilum, dan KIOS-K untuk informasi perkara dan antrian sidang, jadwal sidang, antrian PTSP, aplikasi IKM dan media informasi lainnya.

2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan

Program pengembangan sistem peradilan yang akuntabel dan transparan tercermin dengan Pimpinan telah terlibat secara langsung pada saat penyusunan RENSTRA, Penetapan Kinerja, IKU, Pemantauan Pencapaian kinerja, LKJiP, Penyusunan SAKIP. Pengelolaan Akuntabilitas kinerja tercermin:

- a. Upaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani Akuntabilitas Kinerja;
- b. Tersusunnya Pedoman Akuntabilitas Kinerja;
- c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala;

Pelaporan melalui SIPP, Direktori Putusan, SIKEP MARI, SIMARI, Komdanas, e-LLK, Monitor Jadwal Sidang dan lain-lain.

3. Program Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI

Dengan telah diterbitkannya Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 - 2035, Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA berusaha mengadakan perbaikan dan perubahan seperti apa yang tertuang dalam Cetak Biru tersebut. Rencana strategis telah direviu dan berakhir di tahun 2022 ini.

4. Modernisasi layanan peradilan berbasis teknologi informasi dan Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dalam sistem peradilan modern, penegakan hukum mau tidak mau, suka atau tidak suka harus merespons perkembangan teknologi informasi. Karena sebagai fenomena perubahan paradigma, dimana pun negara-negara di dunia, khususnya negara hukum modern (yang sudah maju maupun berkembang) sistem peradilannya secara langsung atau tidak langsung merespons terjadinya sebuah interaksi sosial (masyarakat pencari keadilan) dengan penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.

Penggunaan teknologi informasi dalam sistem peradilan modern sesungguhnya merupakan salah satu ciri peradilan yang excellent, yaitu manajemen dan kepemimpinan peradilan sebagai “driver” lembaga peradilan, sehingga akan memudahkan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan sumber daya manusia, sumber daya material, sumber daya finansial, dan proses peradilannya. Harapan hasil dari peradilan yang excellent adalah dipenuhinya kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan dalam berproses di pengadilan, keterjangkauan dan mudah diaksesnya informasi perkara, dan adanya keterbukaan yang menimbulkan kepercayaan publik akan lembaga peradilan tersebut.

Pada Program PTSP Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Yogyakarta telah melaksanakan Pelayanan dalam satu meja pelayanan untuk pelayanan perkara perdata, pidana dan kepaniteraan hukum serta pelayanan surat masuk dalam satu meja pelayanan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pengadilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan dan sebagai upaya mencapai good governance/kepemerintahan yang baik.

5. Penguatan anti korupsi melalui pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta menginstruksikan kepada jajarannya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satu strateginya adalah “Strategi Pencegahan”.

Berbagai upaya pencegahan sebenarnya telah dilakukan, antara lain dengan meningkatkan mutu layanan, seperti yang dicontohkan melalui pembentukan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Namun, dalam implementasinya, persepsi masyarakat masih mencerminkan adanya kelemahan, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang meninggalkan sekian celah bagi korupsi.

#### 6. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Implementasi SNI ISO 37001 : 2016 telah dilakukan secara bertahap yang dimulai dengan penetapan Inpres No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang diikuti dengan adopsi ISO 37001 : 2016 menjadi SNI ISO 37001 : 2016 melalui Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional No.248/KEP/BSN/11/2016 pada bulan November 2016. SNI ISO 37001 dirancang bagi organisasi untuk menaati peraturan perundang-undangan serta memiliki kemampuan untuk mencegah (prevent), mendeteksi (detect), dan menangani (respond) terjadinya tindak pidana suap dengan berdasar pada 6 prinsip yaitu prosedur yang proporsional, komitmen pimpinan, manajemen risiko, uji kelayakan (due diligence), komunikasi yang efektif, serta monitoring dan review/evaluasi. Penerapan keenam prinsip tersebut dilakukan dalam sebuah proses yang disebut PDCA yaitu Plan, Do, Check, dan Act. SMAP mendasarkan pada 44 klausul yang menjadi kriteria SMAP yang mana dalam penerapannya di Pengadilan Negeri hanya dilakukan pada 43 klausul karena 1 klausul yaitu adanya organ lain di bawah Pengadilan Negeri tidak diterapkan dalam penilaian. Pada tahapan penerapan SNI ISO 37001 dilakukan persiapan yang meliputi training dan gap analisis, pengembangan sistem yang meliputi pengembangan kebijakan dan pengembangan dokumentasi, implementasi yang meliputi sosialisasi dan implementasi sistem, review sistem yang meliputi audit internal, tinjauan manajemen, dan persiapan sertifikasi, serta Sertifikasi yang meliputi pemilihan lembaga sertifikasi, pelaksanaan audit, perbaikan hasil audit, dan keputusan sertifikasi. Pengadilan negeri yang diajukan sebagai pilot project saat itu diminta untuk melakukan bribery assement terhadap titik-titik rawan suap serta membuat program kerja untuk mengawasi titik-titik rawan suap tersebut. Dalam penerapannya, sistem yang telah ada dalam rangka melakukan pencegahan, pendeteksian, dan penindakan atas perilaku suap disinergikan dalam rangka pengendalian suap dan gratifikasi serta penanganan atas pelanggaran yang terjadi. Terhadap sistem yang telah terbangun dan mendapatkan akreditasi maka akan

dilakukan surveillance pada setiap 1 tahun dan jika ditemukan pelanggaran maka sertifikat SNI ISO 37001: 2016 bisa dicabut.

## B. VISI dan MISI

1. Visi Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA sesuai dengan Visi Mahkamah Agung RI “Terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta Yang Agung”
2. Misi Pengadilan Negeri Yogyakarta juga sesuai dengan Misi Mahkamah Agung RI yaitu:
  - a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA.
  - b. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
  - c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA.
  - d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA

## C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Untuk mewujudkan visi dan misi diatas perlu adanya suatu perencanaan strategis di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA yang terfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif, sesuai tuntutan perkembangan jaman, kualitas hukum dan masyarakat pencari keadilan yang semakin hari semakin kompleks, dan semakin tinggi kualitasnya. Sehingga terbentuk suatu manajemen peradilan yang baik, dengan memperhitungkan tujuan, sasaran atau variabel yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

1. Terciptanya fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Terciptanya pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN.
3. Terciptanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Terciptanya manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional.

5. Tersedianya / terpenuhi sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas operasional terhadap sistem pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan yang ada pada tahun 2022 adalah:

1. Program dari lembaga Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam DIPA adalah:
  - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dalam program ini, Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA yang merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama, selalu berupaya untuk memperkuat kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum dalam rangka mempercepat pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap hukum pada umumnya dan kepada institusi lainnya beserta infrastruktur yang ada, sehingga diharapkan terwujudnya lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas, sehingga pelayanan prima dalam penegakan hukum dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
  - b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum  
Pada Program ini di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA tersedia anggaran untuk perkara operasional persidangan PHI, Pengamanan Persidangan dan Pemberian Konsumsi bagi Terdakwa, pembebasan biaya Perkara dan adanya pelayanan Pos Bantuan Hukum khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu.
  - c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung  
Pada Program ini pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial, Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Yogyakarta tersedia anggaran untuk pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi, Peralatan dan Fasilitas Pendukung Perkantoran serta Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Teknologi Informasi.

#### D. PEROLEHAN PENGHARGAAN

1. Pemenang kategori Aparat Penegak Hukum Ramah Anak dalam Anugerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (KPAID Award) Tahun 2022



2. Peringkat II Lomba Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2022



3. Peringkat I Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun 2022



4. Evaluasi II Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2022



5. Peringkat I Lomba Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022



6. Juara 7 Pengadilan Terbaik dalam pelaksanaan Peradilan Elektronik Kategori Pengadilan Negeri dengan beban perkara 1001-2000.



7. Juara I Keterbukaan Informasi Publik Anugerah Mahkamah Agung



E. KEGIATAN PENGADILAN

Kegiatan yang dilaksanakan maupun diikuti oleh Pengadilan mulai dari Januari sampai dengan Desember 2022:

NO.	TANGGAL	ACARA
1.	3 Januari 2022	1. Apel Pagi Mengawali Awal Tahun 2022 Pengadilan Negeri Yogyakarta 2. Rapat Koordinasi Pengisian Data Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI
2.	5 Januari 2022	1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Kondisi Ruang Persidangan Online Pengadilan Negeri Yogyakarta
3.	7 Januari 2022	1. Rapat Monev Pelaksanaan Persidangan dan Penanganan Perkara Serta Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Bidang
4.	11 Januari 2022	1. Penandatanganan Pakta Intgeritas dan Rapat Pembinaan Serta Monev Kinerja Bulan Januari 2022

5.	12 Januari 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Petugas PTSP Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengawali Tahun 2022</li> <li>2. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2022</li> <li>3. Penyerahan/Penerimaan dan Pengarahan Mahasiswa Magang di Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>4. Klarifikasi dan Negoisasi Teknis Pengadana jasa Konsultasi Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>5. Kunjungan Audiensi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada</li> </ol>
6.	14 Januari 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Pembahasan Pengisian Kuisisioner Implementasi SK Dirjen Badilum Tentang Penyelesaian Perkara Restorative Justice dan Pedoman Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas</li> </ol>
7.	18 Januari 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Teguran/Aanmaning Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> </ol>
8.	19 Januari 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opening Meeting Audit Internal Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2022</li> <li>2. Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2022 Lapas Kelas IIA Yogyakarta</li> </ol>
9.	20 Januari 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengambilan Sisa Hasil Lelang Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>2. Kegiatan Launching SIBANGDIKLAT dan Peresmian Gedung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin</li> </ol>
10.	24 Januari 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kunjungan Kerja Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI</li> </ol>
11.	25 Januari 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring dan Evaluasi Penentuan Panjar Biaya Perkara Tahun 2022</li> <li>2. Mou POSBAKUM Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Rumah Bantuan Hukum AFTA</li> <li>3. Pertemuan dengan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Panitera serta Panitera Muda Pengadilan Negeri se Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta</li> </ol>
12.	26 Januari 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Closing Meeting Audit Internal Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2022</li> </ol>
13.	27 Januari 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan Teknis Penanganan Perkara Bagi Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti</li> </ol>
14.	28 Januari 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta</li> <li>2. Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Peradilan Oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI Januari 2022</li> <li>3. Kunjungan Studi Banding Pengadilan Negeri Temanggung ke Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> </ol>
15.	31 Januari 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Perma 7, 8, 9 Tahun 2016 dan Rapat Teknis Penyelesaian Penanganan Perkara Bagi Hakim</li> <li>2. Rapat Koordinasi dan Persiapan Kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi</li> <li>3. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan</li> </ol>

16.	2 Februari 2022	1. Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Februari 2022 2. Upacara Pembukaan Sosialisasi dan Diseminasi Bela Negara Oleh Kementerian Pertahanan RI
17.	3 Februari 2022	1. Sosialisai Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) 2. Mou Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Universitas Sebelas Maret
18.	7 Februari 2022	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Mutasi Internal Tenaga Teknis
	8 Februari 2022	1. Kunjungan Studi Banding Pengadilan Negeri Padang ke Pengadilan Negeri Yogyakarta
19.	10 Februari 2022	1. Rapat Bidang Kepaniteraan
20.	11 Februari 2022	1. Rapat Pembangunan Zona Integritas Tahun 2022 2. Rapat Satgas Covid-19 Pengadilan Negeri Yogyakarta 3. Pelatihan Penilaian Personal Disabilitas Bersama SAPDA
21.	14 Februari 2022	1. Rapat Penanganan Perkara Restorative Justice
22.	15 Februari 2022	1. Rapat Tinjauan Manajemen dan Sosialisasi Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan 2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Seminar Nasional Fakultas Hukum UGM
23.	16 Februari 2022	1. Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Bersama Komisi Informasi Daerah DIY
24.	17 Februari 2022	1. Rapat Senat Terbuka dan Orasi Ilmiah Bersama Fakultas Hukum UGM 2. Penandatanganan Mou/Perjanjian Kerjasama dengan Fakultas Hukum UGM
25.	18 Februari 2022	1. Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penerapan Keadilan Restoratif dan Alternatif Pemidanaan Bagi Pelaku Dewasa
26.	21 Februari 2022	1. Rapat Satuan Tugas Covid-19 Pengadilan Negeri Yogyakarta kedua 2. Persiapan/Gladi Pelaksanan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2021
27.	22 Februari 2022	1. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2021
28.	23 Februari 2022	1. Rapat Pembinaan dan Monev Kinerja Bulan Februari 2022 2. Rapat Khusus Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta
29.	24 Februari 2022	1. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Sosialisasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas dan Sosialisasi Nilai-Nilai Dasar ASN
30.	1 Maret 2022	1. Rapat Koordinasi dan Pengarahan Penundaan Sementara Layanan Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta
31.	2 Maret 2022	1. Sosialisasi Aplikasi PNBPN Versi 2.0 pada SIMARI Bersama Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
32.	4 Maret 2022	1. Sosialisasi Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana PNBPN Bersama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

33.	7 Maret 2022	1. Pelantikan dan Sumpah Jabatan Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA
34.	9 Maret 2022	1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti FGD Bersama Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
35.	10 Maret 2022	1. Musyawarah Daerah VII Dharmayukti Karini Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022
36.	11 Maret 2022	1. Pengadilan Negeri Yogyakarta Melakukan Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (Booster)
37.	15 Maret 2022	1. Orientasi Peserta dan Pembukaan Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia
38.	16 Maret 2022	1. Rapat Persiapan Webinar IKAHI Internasional dan Persiapan HUT IKAHI ke-69
39.	17 Maret 2022	1. Webinar Internasional Bersama Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia
40.	19 Maret 2022	1. Sidang Pleno Musyawarah Cabang VII Dharmayukti Karini Cabang Kota Yogyakarta Tahun 2022
41.	21 Maret 2022	1. Rapat Pembangunan Zona Integritas 2. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi SKB 6 K/L Bersama Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Kementerian Hukum dan HAM RI
42.	22 Maret 2022	1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Silaturahmi Nasional dan Acara Puncak HUT ke-69 IKAHI 2. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY Tahun 2022 3. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Webinar Bersama SPDA
43.	23 Maret 2022	1. Rapat Pembinaan dan Monev Kinerja Bulan Maret 2022 serta Sosialisasi Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Criminal Justice Sistem 2. Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Perayaan HUT BNN RI ke-20
44.	29 Maret 2022	1. Rapat Koordinasi Pembangunan Mushola Al Mahkamah Pengadilan Negeri Yogyakarta 2. Rapat Penentuan Lomba Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2022
45.	30 Maret 2022	1. Kunjungan Kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam Rangka Persiapan Lomba Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2022
46.	31 Maret 2022	1. Rapat Kepaniteraan dan Sosialisasi SPPT-TI 2. Rapat Pengurus Takmir Mushola Al Mahkamah Pengadilan Negeri Yogyakarta
47.	1 April 2022	1. Sosialisasi Pelaksanaan Program Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 2. Diskusi dan Sosialisasi Perma No. 1 Tahun 2022
48.	4 April 2022	1. Apel Pagi Mengawali Pekerjaan di Bulan Suci Ramadhan 1443 H 2. Undangan Pencanaan Penerapan dan Evaluasi II SMAP
49.	6 April 2022	1. Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Penilai Publik

50	8 April 2022	1. Rapat Koordinasi Perjanjian Kerjasama tentang Penerapan Keadilan Restoratif bagi Tersangka/Terdakwa Dewasa
51	14 April 2022	1. Sidang Luar Biasa Pelantikan, Pengambilan Sumpah dan Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas I.A. 2. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti inar Penganggaran Pengadilan Berbasis Kinerja
52	18 April 2022	1. Apel Pagi Dibulan Suci Ramadhan 1443 H 2. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Sosialisasi Teknis Pengunputan Aplikasi e-Monev Bappenas Tahun 2022 3. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Peringatan Nuzulul Qur'an 1443 H/2022 M
53	19 April 2022	1. Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik se- DIY Tahun 2022 Bersama Komisi Informasi Daerah DIY
54	20 April 2022	1. Rapat Pembinaan dan Monev Kinerja Bulan April 2022 serta Sosialisasi-Sosialisasi
55	22 April 2022	1. Pembinaan Teknis dan Administrasi Oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta
56	25 April 2022	1. Permohonan Audiensi dan Wawancara Oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
57	26 April 2022	1. Rapat Berjenjang Keserikatan Bulan April 2022 2. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mendapat Kunjungan Silaturahmi dengan BAZNAS Kota Yogyakarta 3. Pengadilan Negeri Yogyakarta Melakukan FGD Bersama Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
58	28 April 2022	1. Pengajian Bersama dengan BAZNAS Kota Yogyakarta
59	9 Mei 2022	1. Apel Pagi dan Halal Bihalal Pengadilan Negeri Yogyakarta 1 Syawal 1443 H 2. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Melakukan Silaturahmi dan Halal Bihalal dengan Berbagai Instansi Pemerintah
60	11 Mei 2022	1. Rapat Penyusunan DIPA Tahun 2023 , Reviu Indikator Kinerja Utama dan Dokumen SAKIP Tahun 2022 Pengadilan Negeri Yogyakarta 2. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap I TA 2022
61	12 Mei 2022	1. Rapat Penusunan DIPA Tahun 2023 Pengadilan Negeri Yogyakarta
62	13 Mei 2022	1. Senam Pagi Pengadilan Negeri Yogyakarta 2. Rapat Koordinasi Menuju Pengadilan Informatif 3. Kunjungan Silaturahmi dari Bank Tabungan Negara (BTN) Kota Yogyakarta
63	17 Mei 2022	1. Rapat Berjenjang Keserikatan Bulan Mei 2022 2. Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan e-Court
64	19 Mei 2022	1. Kunjungan Kerja dan Silaturahmi PT. Taspen Kota Yogyakarta

65	20 Mei 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Kepaniteraan se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta</li> <li>2. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Kegiatan Silaturahmi dan Syawalan 1 Syawal 1443 H Bersama Forkopimda Kota Yogyakarta</li> </ol>
66	22 Mei 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Pengantar Akhir Masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Periode 2017-2022</li> </ol>
67	23 Mei 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Bulan Mei 2022</li> <li>2. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta</li> </ol>
68	24 Mei 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mendapat Kunjungan Kerja dari Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI</li> </ol>
69	25 Mei 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Orasi Ilmiah Prof. Dr. Mukti Fajar ND, S.H., M.Hum.</li> </ol>
70	27 Mei 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Evaluasi Implementasi Manajemen Anti Penyuapan</li> <li>2. Kunjungan Studi Banding Peradilan Negeri Cilacap Ke Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>3. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Seminar Nasional Open House MIH UGM</li> </ol>
71	30 Mei 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Kegiatan Sarahsehan Internasional Pembaru Peradilan</li> <li>2. Panitera Peradilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Penutupan Kegiatan Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Lingkungan Peradilan Tahun Anggaran 2022</li> </ol>
72	31 Mei 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Astapura Panitera dalam Acara Wisuda Purna Bakti Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> </ol>
73	2 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Kick Off Sahabat Saksi dan Korban Bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li> </ol>
74	3 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelantikan Pengurus Cabang Dharmayukti Karini Cabang Yogyakarta Masa Bakti 2022-2025</li> </ol>
75	6 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Mengawali Pekerjaan di Bulan Juni 2022</li> </ol>
76	7 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Berjenjang Kereserikatan Bulan Juni 2022</li> <li>2. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Rapat Koordinasi Dilkumjakpol-Plus Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022</li> </ol>
77	9 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti FGD Bersama Kejaksaan Tinggi Yogyakarta</li> <li>2. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti FGD Bersama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta</li> </ol>
78	10 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Pembinaan dan Monev Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Juni 2022</li> </ol>

79	14 Juni 2022	1. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Sosialisasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) 2. Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Sosialisasi Pertunjuk Teknis Penyusunan RKA - K/L TA 2023
80	16 Juni 2022	1. Rapat Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
81	17 Juni 2022	1. Olahraga Pagi Bersama Pengadilan Negeri Yogyakarta 2. Kunjungan Studi Banding Pengadilan Negeri Semarang Ke Pengadilan Negeri Yogyakarta
82	20 Juni 2022	1. Apel Pagi Mengawali Pekerjaan Pengadilan Negeri Yogyakarta
83	21 Juni 2022	1. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama Tentang SPPT - TI 2. Rapat Koordinasi Implementasi Aplikasi e-Berpadu Bersama Pengadilan Tinggi Yogyakarta
84	22 Juni 2022	1. Rapat Koordinasi Persiapan Implementasi Aplikasi e-Berpadu
85	23 Juni 2022	1. Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial Secara Virtual Oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI
86	24 Juni 2022	1. Rapat Koordinasi Kegiatan Sosialisasi e-Berpadu dengan Pihak Eksternal
87	27 Juni 2022	1. Sosialisasi Aplikasi Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) Internal 2. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Sosialisasi Kegiatan Virtual Account PP IKAHI
88	29 Juni 2022	1. Sosialisasi dan Koordinasi Implementasi Aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Yogyakarta 2. Kunjungan Silaturahmi Pengadilan Militer II-1 Yogyakarta ke Pengadilan Negeri Yogyakarta
89	1 Juli 2022	1. Pengawasan dan Monitoring Evaluasi SIPP oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta
90	4 Juli 2022	1. Apel Pagi Mengawali Pekerjaan di Bulan Juli 2022 2. Rapat Koordinasi Pembuatan Video Profil Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 3. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Magang di Pengadilan Negeri Yogyakarta
91	5 Juli 2022	1. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Upacara Bhayangkara ke-76 2. Kunjungan Kerja Komisi Yudisial RI ke Pengadilan Negeri Yogyakarta 3. Kunjungan Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke Pengadilan Negeri Yogyakarta
92	6 Juli 2022	1. Technical Meeting Persiapan Pelaksanaan Seleksi Tertulis Calon Hakim AD HOC Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 2022
93	7 Juli 2022	1. Pelaksanaan Selesai Tertulis Calon Hakim AD HOC Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 2022 di Pengadilan Negeri Yogyakarta

94	12 Juli 2022	1. Rapat Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Implementasi Aplikasi e-Berpadu 2. Kegiatan Focus Group Discussions Bersama Tim Pusat Penelitian Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
95	13 Juli 2022	1. Rapat Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Implementasi Aplikasi e-Berpadu Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta
96	14 Juli 2022	1. Apel Pagi Petugas PTSP 2. Rapat Berjenjang Kereserikatan Bulan Juli 2022 3. Rapat Monev Pelaksanaan Implementasi Aplikasi e-Berpadu 4. Pengadilan Negeri Yogyakarta Melakukan Kegiatan Audiensi Bersama Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta
97	15 Juli 2022	1. Pengadilan Yogyakarta Mengikuti Pelatihan Mainstreaming Disability dan Aksebilitas untuk Aparatur Pengadilan 2. Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Implementasi Aplikasi e-Berpadu Bersama Pengadilan Negeri Yogyakarta 3. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Silaturahmi Nasional ke V dan Pembinaan Hakim AD HOC PHI Tahun 2022
98	18 Juli 2022	1. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Sosialisasi dan Simulasi Aplikasi e-Berpadu
99	19 Juli 2022	1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 2. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Evaluasi Implementasi SPPT - TI di Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta
100	20 Juli 2022	1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 20 Juli 2022
101	21 Juli 2022	1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 21 Juli 2022
102	22 Juli 2022	1. Pelaksanaan Bantuan Dana Beasiswa (BDBS) dan Pertemuan Rutin Dharmayukti Karini Cabang Kota Yogyakarta 2. Pengambilan Sumpah Jabatan Penilai Publik (Appraisal) Pengadilan Negeri Yogyakarta
103	25 Juli 2022	1. Apel Pagi Rutin 25 Juli 2022 2. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Koordinasi Pnyusunan Grand Design Kota Layak Anak Kota Yogyakarta 2022-2030 Kluster IV dan V
104	26 Juli 2022	1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 26 Juli 2022 2. Opening Meeting Assesment Internal Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 3. Skretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Upacara Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun 2022 4. Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan dari CPNS Tahun 2022 Menjadi PNS Pengadilan Negeri Yogyakarta
105	27 Juli 2022	1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 27 Juli 2022 2. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Dialog Yudisial Indonesia, Australia, dan Malaysia Bersama Mahkamah Agung RI dan Federal Circuit & Family Court Of Australia (FCFCOA)

106	28 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 28 Juli 2022</li> <li>2. Rapat Koordinasi e-Berpadu Bersama Pengadilan Tinggi Yogyakarta</li> </ol>
107	29 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan Monev Kinerja Buan Juli 2022 dan Closing Meeting Assesment Internal APM dan SMAP</li> <li>2. Apel Jumat Sore Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>3. Pendidikan Sekaligus Perpisahan Mahasiswa Magang Pengadilan Negeri Yogyakarta Bulan Juli 2022</li> <li>4. Kunjungan Audensi Bank Syariah Indonesia (BSI) ke Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>5. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta</li> </ol>
108	1 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Mengawali Awal Agustus 2022</li> <li>2. Rapat Persiapan HUT Kemerdekaan RI ke- 77 dan HUT Mahkamah Agung HUT ke- 77</li> <li>3. Rapat Monitoring Evaluasi Aplikasi e-Berpadu</li> <li>4. Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Eskesusi Perdata</li> <li>5. Penerimaan Mahasiswa Magang Pengadilan Negeri Yogyakarta Agustus 2022</li> </ol>
109	2 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 2 Agustus 2022</li> <li>2. Rapat Koordinasi Monitoring, dan Evaluasi Aplikasi e-Berpadu</li> <li>3. Rapat Koordinasi Sosialisasi e-Berpadu Bersama Pengadilan Tinggi Yogyakarta</li> <li>4. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Pelatihan Singkat Bersama Mahkamah Agung RI dan LPSK</li> </ol>
110	3 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 3 Agustus 2022</li> <li>2. Seremonial Pembukaan Kegiatan Perlombaan HUT Kemerdekaan RI ke- 77 dan HUT Mahkamah Agung RI ke-77</li> <li>3. Rapat Monitoring Evaluasi Permohonan Eksekusi Perkara Perdata</li> <li>4. Kunjungan Kerja Fakultas Hukum Universitas Proklamasi ke Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>5. Rapat Koordinasi Lanjutan/Intensif Implementasi Aplikasi e-Berpadu</li> </ol>
111	4 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 4 Agustus 2022</li> </ol>
112	8 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin 8 Agustus 2022</li> <li>2. Rapat Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke- 77 dan HUT Mahkamah Agung RI ke- 77</li> <li>3. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Focus Group Discussion Bersama Kejaksaan Tinggi Yogyakarta</li> <li>4. Gladi Bersih Persiapan Sosialisasi Aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Tinggi Yogyakarta</li> </ol>
113	9 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Aplikasi e-Berpadu pada Aparat Penegak Hukum di Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta</li> </ol>
114	10 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 10 Agustus 2022</li> </ol>

115	11 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 11 Agustus 2022</li> <li>2. Kunjungan Kerja Wartawan Harian Jogja ke Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>3. Kunjungan Kerja Tim Pengurus Koperasi Republik Indonesia (PKP-RI) ke Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>4. Sosialisasi Penggunaan Apar dan Simulasi Penanganan Kebakaran di Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>5. Bimbingan Mahasiswa Magang Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> </ol>
116	12 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengadakan Jalan Sehat dan Kegiatan Lomba dalam Rangka Menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke- 77 dan HUT Mahkamah Agung RI ke- 77</li> <li>2. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Pelatihan Mainstreaming Disability dan Akseibilitas</li> <li>3. Panitera Muda Hukum Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta</li> </ol>
117	15 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin 15 Agustus 2022</li> <li>2. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti FGD Bersama Kepolisian Daerah di Yogyakarta</li> <li>3. Kunjungan Permintaan Data Implementasi diversifikasi di Pengadilan oleh Hakim Yustisial Kepaniteraan Mahkamah Agung RI</li> <li>4. Pengadilan Negeri Yogyakarta Menyelenggarakan Donor Darah Bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta</li> </ol>
118	16 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta</li> <li>2. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Webinar Nasional Bersama Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia</li> <li>3. Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Pengukuhan Paskibraka Kota Yogyakarta</li> </ol>
119	17 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadilan Negeri Yogyakarta Melaksanakan Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Ke- 77</li> <li>2. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan ke- 77 Republik Indonesia</li> <li>3. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Upacara Detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke- 77 Bersama Forkopimda</li> <li>4. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Upacara Penurunan Bendera Merah Putih HUT Kemerdekaan RI ke- 77</li> </ol>
120	18 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 18 Agustus 2022</li> <li>2. Rapat Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>3. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mendapatkan Kunjungan Kerja Balai Kemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta</li> <li>4. Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Rapat Teknis Tim Koordinasi Kerja Bersama Daerah Pemerintahan Kota Yogyakarta</li> </ol>

121	19 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengadakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia ke- 77</li> <li>2. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Peluncuran Aplikasi e-Prima dan e-Berpadu oleh Mahkamah Agung RI</li> <li>3. Perpisahan/Pelepasan Mahasiswa Magang Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga di Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>4. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Penyerahan Anugrah dan Duta Peradilan oleh Mahkamah Agung RI</li> </ol>
123	22 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin 22 Agustus 2022</li> <li>2. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mendapatkan Kunjungan Kerja Direktorat Jenderal Permasalahatan Kementerian Hukum dan HAM RI</li> <li>3. Penyerahan Pengumpulan Zakat/Infaq oleh Tim UPZ Pengadilan Negeri Yogyakarta Kepada BAZNAS Kota Yogyakarta</li> </ol>
124	23 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 23 Agustus 2022</li> <li>2. Rapat Monitoring dan Evaluasi Kedisiplinan Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>3. Rapat Baperjakat Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>4. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>5. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mendapatkan Kunjungan Kerja dari Bangian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta</li> </ol>
125	24 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 24 Agustus 2022</li> <li>2. Rapat Berjenjang Keserikatan Bulan Agustus 2022</li> <li>3. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Upacara Penutupan Program TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun 2022</li> <li>4. Fasilitas Klinik Kesehatan Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>5. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mendapatkan Kunjungan Kerja dari Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta</li> <li>6. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengadakan Audensi Bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk</li> <li>7. Pengadilan Negeri Yogyakarta Menerima Mahasiswa Magang di Universitas Sebelas Maret</li> </ol>
126	25 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial Oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI Agustus 2022</li> <li>2. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Pengukuhan dan Pelepasan Kontigen PORDA XVI Kota Yogyakarta</li> </ol>
127	26 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Bulan Agustus, Sosialisasi dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)</li> <li>2. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Pelatihan Mainstreaming Disability untuk Pengadilan</li> </ol>
128	27 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Dsikusi Publik Bersama Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UII</li> </ol>

129	29 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin 29 Agustus 2022</li> <li>2. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mendapatkan Kunjungan Kerja dari Pos Indonesia</li> </ol>
130	30 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 30 Agustus 2022</li> <li>2. Rapat Koordinasi Struktural Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>3. Rapat Koordinasi Tim Implementasi Aplikasi e-Berpadu Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> </ol>
131	31 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 31 Agustus 2022</li> <li>2. Rapat Pengarahan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>3. Operasional Klinik Layanan Kesehatan Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>4. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mendapatkan Kunjungan Kerja dari Bank BRI Cabang Katamsa Yogyakarta</li> <li>5. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengadakan Audensi Bersama DP3KP2KB Kota Yogyakarta dan Yayasan SAPDA</li> </ol>
132	1 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Petugas PTSP Mengawali Kegiatan di Bulan September 2022</li> <li>2. Rapat Koordinasi Terkait Administrasi Perkara Eksekusi Terutama Pengisian pada Aplikasi SIPP</li> </ol>
133	2 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senam Pagi Mengawali Bulan September 2022 Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>2. Rapat Koordinasi Usulan Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>3. Apel Sore Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>4. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti FGD dengan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta</li> <li>5. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Launching Syiar Mukhtar Muhammadiah dan `Aisyiyah ke-48</li> </ol>
134	5 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin 5 September 2022</li> <li>2. Rapat Penyusunan Manajemen Risiko Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>3. Rapat Tim Sistem Manajemen Anti Penyuapan Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>4. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Kisah Sambut Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta</li> </ol>
135	6 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 6 September 2022</li> <li>2. Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja antara Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta</li> </ol>
136	7 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 7 September 2022</li> <li>2. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Dialog Publik Bersama Menko Polhukam</li> <li>3. Surveillance APM, Penilaian PTSP, Keterbukaan Informasi Publik dan Prodeo oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI</li> </ol>
137	8 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 8 September 2022</li> </ol>

138	9 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Tindak Lanjut Hasil Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu</li> <li>2. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mendapatkan Kunjungan Kerja dan Fakultas Hukum Universitas Adma Jaya Yogyakarta</li> <li>3. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Pelatihan Mainstreaming Disability</li> <li>4. Panitera Muda Hukum Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta September 2022</li> <li>5. Panitera Muda Hukum Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta September 2022 (Lanjutan )</li> </ol>
139	12 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin 12 September 2022</li> <li>2. Rapat Berjenjang Kekerukatan Bulan September 2022</li> <li>3. Rapat Persiapan Seminar Bersama Balai Harta Peninggalan Semarang</li> <li>4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti FGD Bersama Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI</li> <li>5. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Permohonan Eksekusi Bersama Pihak Eksternal</li> </ol>
140	13 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 13 September 2022</li> <li>2. Rapat Risk Register Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>3. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Seminar Bersama Balai Harta Peninggalan Semarang</li> <li>4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Pelatihan Tentang Perspektif Disabilitas dan Disabilitas Berhadapan dengan Hukum</li> </ol>
141	14 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 14 September 2022</li> <li>2. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Sosialisasi Aplikasi e-Berpadu</li> <li>3. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Sosialisasi Gugatan Sederhana dan e-Court Bersama Bank BRI Yogyakarta Kantor Cabang Katamso</li> </ol>
142	15 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Rapat Dinas Bersama Pengadilan Tinggi Yogyakarta</li> </ol>
143	16 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Latihan Bersama Tim PTWP Daerah Istimewa Yogyakarta</li> <li>2. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sleman</li> </ol>
144	17 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Pembukaan STQH Tingkat Kota Yogyakarta Tahun 2022</li> </ol>
145	19 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin 19 September 2022</li> </ol>

146	20 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 20 September 2022</li> <li>2. Sosialisasi Gugatan Sederhana dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan e-Court</li> <li>3. Rapat Persiapan Evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)</li> <li>4. Layanan Prioritas Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>5. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mendapatkan Kunjungan Kerja dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)</li> </ol>
147	21 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 21 September 2022</li> <li>2. Sosialisasi Internal SMAP dan Penandatanganan Komitmen Bersama Sistem Manajemen Anti Penyuapan</li> <li>3. Pembukaan Kuliah Praktik Peradilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) di Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Seminar Hukum Kompetisi Secara Online</li> </ol>
148	22 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mendapat Kunjungan Belajar dan Audiensi dari LPSK</li> <li>2. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mendapat Kunjungan Kerja dari Fakultas Hukum UGM</li> <li>3. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mendapat Kunjungan Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja RI</li> </ol>
149	23 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Penyusunan Rancangan Aktualisasi oleh CPNS Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>2. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti BIMTEK Administrasi Perkara Eksekusi Pada SIPP</li> <li>3. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Pelatihan Mainstreaming Disability, Mengenal Disabilitas Mental</li> <li>4. Apel Jumat Sore Bersama Pengadilan Tinggi Yogyakarta</li> </ol>
150	26 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin 26 September 2022</li> <li>2. Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Rapat Koordinasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Angkringan Serta Sipanah Hati</li> </ol>
151	27 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Kegiatan Lokakarya Peninjauan Kurikulum Prodi Hukum UAD</li> </ol>
152	28 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurus Cabang Dharmayukti Karini Kota Yogyakarta Mengikuti Peringatan HUT Dharmayukti Karini XX Tahun 2022</li> <li>2. Pengurus Cabang Dharmayukti Karini Kota Yogyakarta Melakukan Peringatan HUT Dharmayukti Karini XX Tahun 2022</li> <li>3. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Diskusi Panel Menjamin Kesatuan Hukum</li> <li>4. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Diskusi Panel Penerapan Konsep Restoratif Justice oleh Pengadilan di Indonesi dan di Belanda</li> </ol>
153	29 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 29 September 2022</li> <li>2. Rapat Koordinasi Telaah Permohonan Eksekusi</li> <li>3. Pelaksanaan Perkasa Eksekusi Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>4. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Sosialisasi JDIH V2</li> </ol>

154	30 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Pembinaan dan Monev Pengadilan Negeri Yogyakarta Bulan September 2022</li> <li>2. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Pembinaan dan Pembacaan Pakta Integritas Bersama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum</li> </ol>
155	1 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadilan Negeri Yogyakarta Melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2022</li> </ol>
156	3 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin 3 Mengawali Bulan Oktober 2022</li> <li>2. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengadakan Tes Urine Bersama Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta</li> <li>3. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mendapatkan Kunjungan Kerja Badan Peradilan Umum dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta</li> </ol>
157	4 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 4 Oktober 2022</li> <li>2. Rapat Koordinasi Internal Bulan Oktober 2022 Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>3. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Sosialisasi Hasil Pengawasan Pemenuhan Hak Pengsuhan Anak Pada Orang Tua Tunggal, Berkonflik, dan Berceraai</li> <li>4. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mendapatkan Kunjungan Kerja Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI</li> <li>5. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Kegiatan Menyambut Tim TNI Angkatan Laut dan Tim Tempo Media</li> </ol>
158	5 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 5 Oktober 2022</li> <li>2. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Upacara Peringatan HUT TNI ke-77</li> <li>3. Penerimaan dan Pembukaan Kegiatan Praktik Peradilan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga di Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> </ol>
159	6 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kota Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Peresmian Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta</li> </ol>
160	7 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan Kepada Tim Petugas Penjaga Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>2. Pembacaan dan Penandatanganan Pakta Integritas</li> <li>3. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Terkait Surveillance SMAP</li> <li>4. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Pelatihan Mainstreaming Penilaian Personal Bersama Yayasan SAPDA</li> <li>5. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Wayang Jogja Night Carnaval #7</li> </ol>
161	9 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Malam Apresiasi HUT Kota Yogyakarta ke-266</li> </ol>
162	10 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin 10 Oktober 2022</li> <li>2. Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Sekretaris Pengadilan Tinggi Yogyakarta</li> </ol>
163	11 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Seminar Rancangan Aktualisasi CPNS Gol. III</li> </ol>
164	12 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 12 Oktober 2022</li> <li>2. Kegiatan Klinik Kesehatan Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> </ol>

165	13 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 13 Oktober 2022</li> <li>2. Permohonan Informasi Wartawan Radar Jogja Ke Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>3. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Sosialisasi SPPT-TI</li> </ol>
166	14 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Monitoring dan Evaluasi SIPP</li> <li>2. Evaluasi Pelaksanaan SMAP oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2022</li> </ol>
167	17 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin 17 Oktober 2022</li> <li>2. Rapat Monev Kedisiplinan Triwulan III Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> </ol>
168	18 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 18 Oktober 2022</li> <li>2. Pembukaan On The Spot Judicial Monitoring (OTSJM) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Pembukaan Mahasiswa Magang Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) di Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> </ol>
169	19 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 19 Oktober 2022</li> <li>2. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Sesi-Sesi dalam Kunjungan Kerja Mahkamah Agung RI ke FCFCoA</li> </ol>
170	20 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 20 Oktober 2022</li> <li>2. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti FGD Penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Yogyakarta</li> <li>3. Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler Oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI</li> </ol>
171	21 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Olahraga Senam Pagi Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>2. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Pelatihan Mainstreaming Disability Membuat Media Informasi dan Publikasi yang Aksesibel</li> </ol>
172	24 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin 24 Oktober 2022</li> </ol>
173	25 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan Prioritas PTSP Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>2. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 25 Oktober 2022</li> <li>3. Permohonan Informasi Perihal Permohonan Eksekusi Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>4. Pengawasan Daerah Oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> </ol>
174	26 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 26 Oktober 2022</li> <li>2. Rapat Evaluasi SMAP dan Pengawasan BAWAS, Pengadilan Tinggi Serta PPID</li> </ol>
175	27 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Beberapa Kegiatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>2. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Bersama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum</li> </ol>
176	28 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 Tahun 2022</li> <li>2. Rapat Panitia Sosialisasi Restitusi</li> <li>3. Pertemuan, Sosialisasi Dharmayukti Karini se DIY dan Sosialisasi Pembuatan Laporan Kegiatan Pengurus Cabang</li> </ol>

177	30 Oktober 2022	1. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Closing Ceremony National Moot Court Competition Universitas Ahmad Dahlan
178	31 Oktober 2022	1. Apel Pagi Rutin Menutup Bulan Oktober 2022
179	1 Novemer 2022	1. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Diseminasi Panduan Berinteraksi dengan Kelompok Difabel Tenaga Kepaniteraan Pengadilan
180	2 November 2022	1. Apel Pagi Petugas PTSP Mengawali Bulan November 2022 2. Rapat Tim Baperjakat Pengadilan Negeri Yogyakarta
181	3 November 2022	1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 3 November 2022 2. Rapat Monitoring dan Evaluasi Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata 3. Pengadilan Negeri Yogyakarta Menerima Kunjungan Kerja dari Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
182	4 November 2022	1. Rapat Pembinaan dan Monev Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Bulan Oktober 2022 2. Permohonan Informasi Terhadap Permohonan Eksekusi Pengadilan Negeri Yogyakarta 3. Rapat Panitia Sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2022 dan Optimalisasi Website LIRIKAN 4. Permohonan Informasi Terkait Pembantaran Terhadap Terdakwa Pidana
183	7 November 2022	1. Apel Pagi Rutin 7 Novemer 2022 2. Rapat Panitia Kegiatan Sosialisasi e-Court dan Gugatan Sederhana 3. Sosialisasi PERMA No. 1 Tahun 2022 dan Pengenalan Optimalisasi Website LIRIKAN 4. Kegiatan Bimbingan Mahasiswa Magang Pengadilan Negeri Yogyakarta
184	8 November 2022	1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 8 November 2022 2. Rapat Koordinasi Monitoring Evaluasi e-Berpadu Pengadilan Negeri Yogyakarta 3. Pengawasan dan Pembinaan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta
185	9 November 2022	1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 9 November 2022 2. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Fakultas Hukum Universitas Janabadra dan Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45
186	10 November 2022	1. Pengadilan Negeri Yogyakarta Melaksanakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2022
187	11 November 2022	1. Rapat Panitia Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Informasi dan SMAP 2. Apel Sore Rutin 11 November 2022 3. Latihan Bersama Pengurus PTWP Cabang Pengadilan Negeri Yogyakarta 4. Sosialisasi e-Court dan Gugatan Sederhana Tahun 2022 Pengadilan Negeri Yogyakarta

188	14 November 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin 14 November 2022</li> <li>2. Rapat Berjenjang Keserikatan bulan November 2022</li> <li>3. Rapat Koordinasi Teknis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu)</li> </ol>
189	15 November 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 15 November 2022</li> <li>2. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut SMAP, Pengawasan BAWAS Mahkamah Agung RI dan Pengawasan Daerah PT Yogyakarta</li> <li>3. Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Sosialisasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2022</li> </ol>
190	17 November 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Kegiatan Monev Komisi Informasi Badan Publik se-DIY Tahun 2022</li> </ol>
191	18 November 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Bimtek Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)</li> <li>2. Sosialisasi Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Informasi dan SMAP Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>3. Kunjungan Kerja Lembaga Rifka Annisa ke Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> </ol>
192	22 November 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> </ol>
193	24 November 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 24 November 2022</li> <li>2. Persiapan Penilaian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Oleh Tim Biro Pelengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI</li> <li>3. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Kegiatan Coaching Cleaning PPNS Pemerintah Kota Yogyakarta</li> <li>4. Pengadilan Negeri Yogyakarta Menerima Permohonan Klarifikasi Terkait Perkara Eksekusi</li> </ol>
194	25 November 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kemampuan Tipiring Bagi Personal Kepolisian</li> <li>2. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mendapatkan Penghargaan KPAID Award Kota Yogyakarta Tahun 2022</li> </ol>
195	26 November 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Kegiatan Pengenalan Profesi Sengketa Alternatif (ADR) Bersama Universitas Adma Jaya Yogyakarta</li> </ol>
196	28 November 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin 28 November 2022</li> <li>2. Pengadilan Negeri Yogyakarta Melaksanakan Tes Urine Bersama Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta</li> </ol>
197	29 November 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 29 November 2022</li> </ol>
198	30 November 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 30 November 2022</li> <li>2. Rapat Pembinaan dan Monev Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Oktober 2022</li> <li>3. Purnabakti Pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta, Bapak Narsiyo</li> </ol>

199	1 Desember 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP Mengawali Bulan Desember 2022</li> <li>2. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembinaan dan Monev Kinerja Bulan Oktober 2022</li> <li>3. Studi Pengayaan Lapangan (SPL) Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor di Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> </ol>
200	2 Desember 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Briefing Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)</li> </ol>
201	3 Desember 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Pentas Seni Rakyat Ketoprak Kolaborasi Pejabat dan Masyarakat</li> </ol>
202	5 Desember 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin 5 Desember 2022</li> <li>2. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Kegiatan Peresmian Operasioal 13 Pengadilan Tingkat Banding Baru dan 38 Gedung Pengadilan Tingkat Pertama</li> </ol>
203	6 Desember 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 6 Desember 2022</li> <li>2. Rapat Rencana Penganggaran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dan Prodeo</li> <li>3. Studi Akademik Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor di Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>4. Kunjungan Kerja Tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (bappenas) di Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> </ol>
204	7 Desember 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 7 Desember 2022</li> <li>2. Kegiatan Fasilitas Klinik Kesehatan Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>3. Fasilitas Ruang Pengasuhan Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>4. Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>5. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Rapat Koordinasi Satgas SIPP se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta</li> <li>6. Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Rapat Koordinasi Bersama Dinas Perpustakaan Arsip Daerah (DPAD)</li> </ol>
205	8 Desember 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 8 Desember 2022</li> <li>2. Rapat Koordinasi Terkait Pelaksanaan Eksekusi</li> <li>3. Rapat Koordinasi TLHP pada Pengawasan Reguler Bawas Mahkamah Agung RI, Pengawasan Daerah PT Yogyakarta dan Persiapan Kegiatan Mahkamah Agung/Dharmayukti Karini Pusat</li> </ol>
206	9 Desember 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monev Layanan POSBAKUM Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> </ol>
207	10 Desember 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Kegiatan Pelaksanaan Pengenalan Profesi Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) Laboratorium Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta</li> </ol>
208	12 Desember 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mendapatkan Penghargaan Peningkatan Kinerja Bagi Peradilan Umum</li> <li>2. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mendapatkan Kunjungan Kerja dari Pengadilan Negeri Klaten</li> </ol>
209	14 Desember 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Operasional Klinik Kesehatan Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> <li>2. Permohonan Informasi Terhadap Perkembangan Permohonan Perkara Eksekusi</li> <li>3. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Kegiatan Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri (Forkomsam)</li> </ol>

		4. Kunjungan (Studi Lapangan) Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta ke Pengadilan Negeri Yogyakarta
210	15 Desember 2022	1. Rapat Koordinasi dan Penyampaian Laporan Keuangan Seputar Kegiatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta
211	16 Desember 2022	1. Pembinaan dan Monev Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) Pengadilan Negeri Yogyakarta 2. Perwakilan Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Pelatihan Petugas Pojok Baca
212	19 Desember 2022	1. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Peringatan Dies Natalis ke-73 Universitas Gadjah Mada 2. Pengadilan Negeri Yogyakarta Melaksanakan Eksekusi Riil Perkara Perdata
213	20 Desember 2022	1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 20 Desember 2022 2. Permohonan Informasi Terkait Kerjasama Antara Surat Kabar Harian Jogja dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta
214	21 Desember 2022	1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 21 Desember 2022 2. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Kegiatan Pengumuman Hasil Evaluasi dan Pembangunan SMAP
215	22 Desember 2022	1. Apel Pagi Rutin Petugas PTSP 22 Desember 2022 2. Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Sosialisasi Pembaruan Aplikasi e-Court 4.0.0
216	23 Desember 2022	1. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Apel Siaga Pengamanan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023 2. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
217	26 Desember 2022	1. Apel Pagi Rutin 26 Desember 2022 2. Rapat Koordinasi Kegiatan Pengantar Alih Petugas Hakim dan Pegawai Serta Purna Tugas Pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta 3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Rapat Pembinaan Bersama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

## BAB II KEADAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA

### A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Keadaan perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Keadaan Perkara di Pengadilan Umum
  - a. Keadaan Perkara Tingkat Pertama
    - i. Perkara Perdata

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2021	Sisa Perkara 2022
1	PN Yogyakarta						
	Perdata Gugatan	55	172	68	24	186	48
	Perdata Permohonan	34	432	69	29	417	28
	Gugatan Sederhana	0	25	0	9	9	0
	Perlawanan/Derden Verzet	0	7	3	0	2	3
	Jumlah	89	636	140	62	614	79

ii. Perkara PHI

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2021	Sisa Perkara 2022
1	PN Yogyakarta						
	PHI	2	39	31	-	39	2
Jumlah							

iii. Perkara Pidana

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa Perkara 2022
1	PN Yogyakarta						
	Pidana Biasa	39	332	371	0	314	57
	Pidana Singkat	0	1	1	0	1	0
	Pidana Cepat	0	190	190	0	190	0
	Lalu lintas	0	9019	9019	0	9019	0
	Pidana Anak	2	14	16	0	16	0
	Pidana Praperadilan	0	2	2	1	1	0
Jumlah		41	9558	9599	1	9541	57

iv. Perkara Tipikor

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa Perkara 2022
1	PN Yogyakarta						
	Tindak Pidana Korupsi	12	16	28	0	17	11
Jumlah		12	16	28	0	17	11

b. Keadaan Perkara Tingkat Banding

i. Perkara Perdata

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa Perkara 2022
1	PN Yogyakarta						
	Perdata Gugatan	18	32	22	3	28	2
	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
	Gugatan Sederhana	0	1	1	0	1	0
	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0	0
Jumlah		18	33	23	3	29	2

ii. Perkara Pidana

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa Perkara 2022
1	PN Yogyakarta						
	Pidana Biasa	2	21	23	3	18	2
	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
	Lalu lintas	0	0	0	0	0	0
	Pidana Anak	0	1	1	0	1	0
	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	2	22	24	3	19	2

iii. Perkara Tipikor

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa Perkara 2022
1	PN Yogyakarta						
	Tindak Pidana Korupsi	0	19	19	1	7	2
	Jumlah	0	19	19	1	7	2

c. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

i. Perkara Perdata

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa Perkara 2022
1	PN Yogyakarta						
	Perdata Gugatan	26	21	40	0	17	40
	Perdata Permohonan	1	1	2	0	0	2
	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0	0
Jumlah		27	22	42	0	17	42

ii. Perkara PHI

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa Perkara 2022
1	PN Yogyakarta						
	PHI	24	33	57	-	42	15
Jumlah							

iii. Perkara Pidana

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa Perkara 2022
1	PN Yogyakarta						
	Pidana Biasa	13	9	22	0	14	8
	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
	Lalu lintas	0	0	0	0	0	0
	Pidana Anak	1	0	1	0	1	0
	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	14	9	23	0	15	8

iv. Perkara Tipikor

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa Perkara 2022
1	PN Yogyakarta						
	Tindak Pidana Korupsi	0	8	8	0	1	7
	Jumlah	0	8	8	0	1	7

d. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

i. Perkara Perdata

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa Perkara 2022
1	PN Yogyakarta						
	Perdata Gugatan	3	8	9	0	2	9
	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
	Perlawanan/Derden Verzet	0	1	1	0	0	1
	Jumlah	3	9	10	0	2	10

ii. Perkara Pidana

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa Perkara 2022
1	PN Yogyakarta						
	Pidana Biasa	0	0	0	0	0	0
	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
	Lalu lintas	0	0	0	0	0	0
	Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0	0

iii. Perkara Tipikor

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa Perkara 2022
1	PN Yogyakarta						
	Tindak Pidana Korupsi	1	5	6	0	0	6
	Jumlah	1	5	6	0	0	6

2. Penyelesaian Perkara

a. Jumlah sisa perkara yang diputus

i. Perkara Perdata

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Tahun 2021	Sisa Tahun 2021 Yg di Cabut 2022	Sisa Th 2021 yg di Putus 2022	Sisa Perkara 2021 Yg Belum diputus
1	PN Yogyakarta				
	Perdata Gugatan	65	0	65	0
	Perdata Permohonan	30	0	30	0
	Gugatan Sederhana	0	0	0	0
	Perlawanan ( Derden Verzet)	0	0	0	0
	Jumlah	95	0	95	0

ii. Perkara PHI

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Tahun 2021	Sisa Tahun 2021 Yg di Cabut 2022	Sisa Th 2021 yg di Putus 2022	Sisa Perkara 2021 Yg Belum diputus
1	PN Yogyakarta				
	PHI	2	-	2	-
Jumlah					

iii. Perkara Pidana

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Tahun 2021	Sisa Tahun 2021 Yg di Cabut 2022	Sisa Th 2021 yg di Putus 2022	Sisa Perkara 2021 Yg Belum diputus
1	PN Yogyakarta				
	Pidana Biasa	39	0	39	0
	Pidana Singkat	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	0	0	0
	Lalu lintas	0	0	0	0
	Pidana Anak	2	0	2	0
	Pidana Praperadilan	0	0	0	0
Jumlah		41	0	41	0

iv. Perkara Tipikor

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Tahun 2021	Sisa Tahun 2021 Yg di Cabut 2022	Sisa Th 2021 yg di Putus 2022	Sisa Perkara 2021 Yg Belum diputus
1	PN Yogyakarta				
	Tindak Pidana Korupsi	12	0	12	0
	Jumlah	12	0	12	0

b. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

i. Perkara Perdata

No	Pengadilan / Perkara	Perkara Yg Ditangani		Perkara Yang Diputus	Putusan Kurang Dari 5.Bulan	Putusan Lebih Dari 5.Bulan
		Sisa 2021	Masuk 2022			
1	PN Yogyakarta					
	Perdata Gugatan	64	172	186	171	15
	Perdata Permohonan	13	432	417	417	0
	Gugatan Sederhana	0	25	25	0	0
	Perlawanan ( Derden Verzet)	0	5	2	2	0
	Jumlah	77	634	630	590	15

ii. Perkara PHI

No	Pengadilan / Perkara	Perkara Yg Ditangani		Perkara Yang Diputus	Putusan Kurang Dari 5.Bulan	Putusan Lebih Dari 5.Bulan
		Sisa 2021	Masuk 2022			
1	PN Yogyakarta					
	PHI	2	39	39	39	-
Jumlah						

iii. Perkara Pidana

No	Pengadilan / Perkara	Perkara Yg Ditangani		Perkara Yang Diputus	Putusan Kurang Dari 5.Bulan	Putusan Lebih Dari 5.Bulan
		Sisa 2021	Masuk 2022			
1	PN Yogyakarta					
	Pidana Biasa	39	332	314	310	4
	Pidana Singkat	0	1	1	1	0
	Pidana Cepat	0	190	190	190	0
	Lalu lintas	0	9019	9019	9019	0
	Pidana Anak	2	14	16	16	0
	Pidana Praperadilan	0	2	2	2	0
Jumlah		41	9558	9542	9538	4

iv. Perkara Tipikor

No	Pengadilan / Perkara	Perkara Yg Ditangani		Perkara Yang Diputus	Putusan Kurang Dari 5.Bulan	Putusan Lebih Dari 5.Bulan
		Sisa 2021	Masuk 2022			
1	PN Yogyakarta					
	Tindak Pidana Korupsi	12	16	17	15	5
	Jumlah	12	16	17	15	5

c. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

i. Upaya Hukum Banding

1) Perkara Perdata

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan PN 2021 Belum BHT	Jumlah Putusan PN 2022 (Contentius)	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
1	PN Yogyakarta				
	Perdata Gugatan	64	185	32	153
	Perdata Permohonan	13	417	0	417
	Gugatan Sederhana	0	25	1	24
	Perlawanan/Derden Verzet	0	4	0	0
	Jumlah	77	631	33	594

2) Perkara Pidana

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan PN 2021 Belum BHT	Jumlah Putusan PN 2022 (Contentius)	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
1	PN Yogyakarta				
	Pidana Biasa	9	314	27	302
	Pidana Singkat	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	0	0	0
	Lalu lintas	0	0	0	0
	Pidana Anak	0	16	1	15
	Pidana Praperadilan	0	0	0	0
	Jumlah	9	330	28	317

3) Perkara Tipikor

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan PN 2021 Belum BHT	Jumlah Putusan PN 2022 (Contentius)	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
1	PN Yogyakarta				
	Tindak Pidana Korupsi	8	15	12	5
	Jumlah	8	15	12	5

ii. Upaya Hukum Kasasi

1) Perkara Perdata

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan Banding 2021 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2022	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	PN Yogyakarta				
	Perdata Gugatan	6	28	17	17
	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0
Jumlah		6	28	17	17

2) Perkara PHI

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan Banding 2021 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2022	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	PN Yogyakarta				
	PHI			27	12
Jumlah					

3) Perkara Pidana

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan Banding 2021 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2022 Yg Diterima PT	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	PN Yogyakarta				
	Pidana Biasa	1	18	9	10
	Pidana Singkat	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	0	0	0
	Lalu lintas	0	0	0	0
	Pidana Anak	0	1	0	1
	Pidana Praperadilan	0	0	0	0
	Jumlah	1	19	9	11

4) Perkara Tipikor

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan Banding 2021 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2022 Yg Diterima PT	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	PN Yogyakarta				
	Tindak Pidana Korupsi	8	7	8	1
	Jumlah	8	7	8	1

iii. Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

1) Perkara Perdata

No	Pengadilan/Perkara	Putusan Tk. I Thn 2022 Yg Telah BHT	Putusan Banding Thn 2022 Telah BHT	Putusan Kasasi Tahun 2022	Permohonan PK Tahun 2022	Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK
1	PN Yogyakarta					
	Perdata Gugatan	169	27	17	8	11
	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0
	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0
	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0
	Jumlah	169	27	17	8	11

2) Perkara Pidana

No	Pengadilan/Perkara	Putusan Tk. I Thn 2022 Yg Telah BHT	Putusan Banding Thn 2022 Telah BHT	Putusan Kasasi Tahun 2022	Permohonan PK Tahun 2022	Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK
1	PN Yogyakarta					
	Pidana Biasa	311	8	14	0	333
	Pidana Singkat	1	0	0	0	0
	Pidana Cepat	190	0	0	0	0
	Lalu lintas	9019	0	0	0	0
	Pidana Anak	16	1	0	0	0
	Pidana Praperadilan	2	0	0	0	0
	Jumlah	9539	9	14	0	333

3) Perkara Tipikor

No	Pengadilan/Perkara	Putusan Tk. I Thn 2022 Yg Telah BHT	Putusan Banding Thn 2022 Telah BHT	Putusan Kasasi Tahun 2022	Permohonan PK Tahun 2022	Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK
1	PN Yogyakarta					
	Tindak Pidana Korupsi	15	1	1	5	9
Jumlah		15	1	1	5	9

d. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil Mediasi

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara Mediasi	Status			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Proses Mediasi	Tidak dapat dilaksanakan
1	Pengadilan Negeri Yogyakarta		2	80	4	6
Jumlah						

e. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status		
				Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
1	Pengadilan Negeri Yogyakarta	14	0	0	0	0
Jumlah		14	0	0	0	0

DATA LAYANAN NON PERKARA

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH
1	Surat Masuk	4248
2	Surat Keluar	5858
3	Penyitaan	528
4	Penggeladahan	230
5	Surat Keterangan	231
6	Tamu	1723
7	Permohonan Informasi Langsung	324
8	Permohonan Informasi Online	1032
9	Izin Besuk	1187
10	Penahanan	38
11	Pembanataran	1
12	Pinjam Pakai	2

B. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

1. Posbakum (Pos Bantuan Hukum)

No	Satuan Kerja	Organisasi Pemberi Layanan	Jumlah Layanan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Ket
1	PN Yogyakarta	LBH AFTA	903 Layanan	48.000.000	48.000.000	0	
Jumlah							

Menurut SEMA Nomor:10 Tahun 2010, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Peradilan Umum diartikan sebagai ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Ruang Posbakum digunakan untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat. Posbakum diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu membayar pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum mereka.

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

1. Konsultasi
2. Pembuatan Dokumen Hukum
3. Pendampingan persidangan

Kendala yang dihadapi :

1. Resiko Penyalahgunaan wewenang (sebagai lapak menjual jasa)
2. Resiko penyuapan

Langkah antisipasi dan penyelesaian :

1. Pakta Integritas semua petugas pos bakum
2. Voice Warning System anti penyuapan dan anti gratifikasi
3. Banner / Informasi Mekanisme Pengaduan
4. Monitoring tiap bulan oleh hakim pengawas

## 2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

No	Satuan Kerja	Jumlah Kegiatan	Jumlah Perkara	Pagu Anggaran	Jumlah Serapan	Sisa Anggaran	Ket
1	PN Yogyakarta	0	0	0	0	0	
Jumlah							

## 3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

No	Satuan Kerja	Target Perkara	Jumlah Perkara	Pagu Anggaran	Jumlah Serapan	Sisa Anggaran	Ket
1	PN Yogyakarta	3 Perkara	4 Perkara	2.760.000	1.455.000	555.000	
Jumlah							

Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA pada tahun anggaran 2022 ini mendapat alokasi anggaran dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang tertuang dalam DIPA No.005.03.099128/2021 untuk 3 (tiga) perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) Rp. 2,760,000,- dan terealisasi 4 (empat) perkara. Hal ini telah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk perkara perdata, keseluruhan pendaftaran perkara dilakukan secara e-court. Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA telah melakukan sosialisasi dan public campaign ke masyarakat.

### BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

#### A. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur yang menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan. Dengan beban kerja yang ada dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi jumlah, pendidikan dan kompetensi. Adapun keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut:

No	No	Nama	NIP	Jabatan	Pangkat
KETUA, WAKIL KETUA DAN HAKIM					
1	1	MUH.DJAUHAR SETYADI, SH.,MH	19680706 199603 1 006	Ketua	Pembina Utama Muda (IV/c)
2	2	MUJIONO, SH.,MH	19670728 199603 1 001	Wakil Ketua	Pembina Utama Muda (IV/c)
3	3	P.COKRO HENDRO MUKTI, SH	19650920 199203 1 004	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya (IV/d)
4	4	SUNDARI, SH.,MH	19640704 199212 2 002	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya (IV/d)
5	5	AGNES HARI NUGRAHENI, SH.,MH	19670120 199303 2 003	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya (IV/d)
6	6	TRI RACHMAT SETIJANTA, SH.,MH	19651012 198603 1 002	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya (IV/d)
7	7	MUSTAJAB, SH.,MH	19651008 198601 1 001	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya (IV/d)
8	8	SUPARMAN, S.H.,M.H.	19640820 199212 1 001	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
9	9	NASRULLOH, SH	19690724 199603 1 002	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
10	10	SRI ARI ASTUTI, SH.,MH	19700414 199603 2 001	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
11	11	VONNY TRISANINGSIH, SH.,MH	19671023 199603 2 002	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
12	12	PURNAMA, SH.,MH	19681006 199603 1 001	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
13	13	TRI RISWANTI, SH.,M.Hum	19710222 199603 2 001	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
14	14	MAHAPUTRA, SH., MH.	19610706 199003 1 007	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
15	15	MOCH. ARIF SATIYO WIDODO, SH.,MH	19690320 199403 1 002	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
16	16	A.SURYO HENDRATMOKO, SH	19711112 199903 1 004	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
17	17	HERI KURNIAWAN, SH.,MH	19720831 199403 1 002	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
18	18	AGUS SETIAWAN, SH.,Sp.Not	19740808 200012 1 001	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
19	19	TRI ASNURI HERKUTANTO, SH.,MH	19770128 200012 1 001	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
20	20	FITRI RAMADHAN, SH	19751028 200012 2 002	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
21	21	WISNU KRISTIYANTO, SH.,MH	19770622 200112 1 002	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
22	22	YULANTO PRAFIFTO UTOMO, SH.,MH	19780719 200112 1 004	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
23	23	GABRIEL SIALLAGAN, SH.,MH	19780112 200212 1 002	Hakim Madya Pratama	Pembina (IV/a)

STRUKTURAL KEPANITERAAN (TEKNIS)					
24	1	ABDUL KADIR RUMODAR, SH	19630717 198503 1 004	Panitera	Pembina (IV/a)
25	2	DIAN UMAWATI,SH., MH	19780708 200604 2 001	Panitera Muda Perdata	Pembina (IV/a)
26	3	NARTI HARTATI, SH	19670222 198903 2 001	Panitera Muda Pidana	Penata Tk.I (III/d)
27	4	YULITA SRI WIDAYATI, SH	19641228 198603 2 002	Panitera Muda Tipikor	Penata Tk.I (III/d)
28	5	KISWANTANA,SH	19690527 199403 1 002	Panitera Muda PHI	Penata Tk.I (III/d)
29	6	EKA SURYA SETIAWAN, SH	19760613 200012 1 001	Panitera Muda Hukum	Penata Tk.I (III/d)

PANITERA PENGGANTI					
30	1	THESIANA MAYA FITRIA A, SH.,MH	19780127 200212 2 003	Panitera Pengganti	Pembina (IV/a)
31	2	KUS YULIANI,SH	19640801 199203 2 002	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
32	3	RR.DINAWATI, SH	19671020 199303 2 005	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
33	4	Rr. SRI WINASTUTI,SH	19690714 199403 2 005	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
34	5	ANNA HENY W,SH	19660602 199903 2 003	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
35	6	MARIA LUSIATI,SH	19691115 199203 2 004	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
36	7	KUWAT WAHYU MURDANA,SH	19690805 199203 1 004	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
37	8	YANI WIDIYANTI, SH	19700119 199203 2 002	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
38	9	SRI SUWANTI, SH	19700610 199203 2 002	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
39	10	NURI MAHAR KESTRI,SH	19750905 200112 2 001	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
40	11	NOORMAN NEFONANTO,SH	19640109 198903 1 003	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
41	12	NUNUNG DIAH RST, SH	19660409 199003 2 003	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
42	13	ANTONIUS ANDI SUSANTO, SH	19711110 200604 1 001	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
43	14	SURYONO NUGROHO,SH	19660518 198803 1 001	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
44	15	DEWI INDRIYANI, SH	19830427 200805 2 001	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
45	16	HERI SANTOSA, SH	19820331 200805 1 001	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
46	17	OCTAVIA MARIANA WIJAYANTI, SH.,MH	19831026 200801 2 008	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
47	18	RULLIANA YUDAWATI, SH	19790709 200904 2 004	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
48	19	YUDHA AYU TIMORNIYATI, SH	19760615 200604 2 002	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
49	20	RR. WORO HAPSARI D,SH	19770607 200012 2 002	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
50	21	RIKE SIMBALAGO, SH	19850805 200912 2 005	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
51	22	M.V. NANIK SETIASIH	19631210 198503 2 002	Panitera Pengganti	Penata (III/c)
52	23	NAFISATUN ANA FITRIA UTAMI, SH	19820706 201101 2 009	Panitera Pengganti	Penata (III/c)
53	24	AGUS RIYANTO, SH	19711106 199303 1 002	Panitera Pengganti	Penata (III/c)
54	25	YUNITA NILA KRISNA, SH	19900613 200904 2 001	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk.I (III/b)
55	26	SHEILA POSITA, SH.,MH	19880325 201503 2 001	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk.I (III/b)

JURUSITA					
56	1	HERI PRASETYA, SH	19730626 199403 1 003	Jurusita	Penata Tk I (III/d)
57	2	LUSI RACHMAYANI,SE.SH	19750825 200604 2 003	Jurusita	Penata Tk.I (III/d)
58	3	ARLYO PERDANA PUTRA,SH	19800707 200805 1 001	Jurusita	Penata Tk.I (III/d)
59	4	HERI CATUR PUDIYANTO	19670414 199303 1 004	Jurusita	Penata (III/c)
60	5	NANANG SUPRIYADI, SE.,SH.,M.Kn	19730525 200604 1 004	Jurusita	Penata (III/c)
61	6	SALASA AGUS EKOYADI, SH	19721004 199303 1 005	Jurusita	Penata (III/c)
62	7	NURMAYA REZEKY AR, SH	19800101 200805 2 002	Jurusita	Penata Muda Tk.I (III/b)

JURUSITA PENGGANTI					
63	1	JEANNE PAMELA,S.Kom,MT	19820922 200904 2 008	JSP / Staf Kepan Perdata	Penata Tk. I (III/d)
64	2	WARSIYATI	19700117 199003 2 001	JSP / Staf Kepan Pidana	Penata Muda Tk.I (III/b)

65	3	DOMINGOS DOUDEL	19760101 199510 1 001	JSP / Staf Sub Bag Umum dan Keu	Penata Muda Tk.I (III/b)
66	4	MOHAMAD SAID IDUL FITRI	19681221 199003 1 002	JSP / Staf Kepan Perdata	Penata Muda Tk.I (III/b)
67	5	TAUFIK HENDRAWAN, SE	19861122 201101 1 004	JSP / Staf Kepan Perdata	Penata Muda (III/a)

#### STRUKTURAL KESEKRETARIATAN (NON TEKNIS)

68	1	TASIMAN, SH.,MH	19730816 199403 1 001	Sekretaris	Pembina Tk.I (IV/b)
69	2	WALJIYANTO,ST.,MM	19800831 200604 1 003	Ka.Sub Bag. Umum dan Keuangan	Pembina (IV/a)
70	3	EVENDI NUGROHO,ST	19810330 200604 1 004	Ka.Sub Bag.Kepeg. Ortalak	Penata Tk.I (III/d)
71	4	YENNY VIKKY EFFENDY,ST.SH.M.Eng	19840410 200904 2 016	Ka.Sub Bab PTIP	Penata Tk.I (III/d)

#### TENAGA FUNGSIONAL

72	1	YETI EKO ISBANDIYAH, S.IP	19650426 198503 2 003	Analisis kepegawaian Ahli Muda	Penata Tk.I (III/d)
73	2	NUGRAHA ABDILLAH, S.Kom	19910203 201903 1 005	Pranata Komp.Ahli Pertama	Penata Muda (III/a)
74	1	WIDODO BUDI SANTOSO, SH	19730921 199303 1 004	Analisis Perkara Peradilan	Pembina (IV/a)
75	2	KUNCORO SETYA R,SE.,MM	19860724 201101 1 005	Penyusun Laporan Keuangan	Penata (III/c)
76	3	YUDI WIDIARSONO, S.Kom	19800917 201101 1 004	Bendahara-Umum dan Keu	Penata (III/c)
77	4	ARDI WICAKSONO, ST	19851018 201503 1 001	Analisis Humas	Penata Muda Tk.I (III/b)
78	5	NOVITA DIASTUTI, S.Kom	19891126 201503 2 003	Analisis Tata Laksana-Kortala	Penata Muda (III/a)
79	6	MOH. RUSDIANTO	19721216 199303 1 001	Teknisi Sarana dan Prasarana-Umum	Pengatur (II/c)
80	7	NINDYA YOSDALU PUTRA	19780619 201408 1 004	Pengadministrasi Hukum	Pengatur (II/c)
81	8	OKTA EMILIA LARASATI, SH	19951016 202012 2 006	Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda (III/a)
82	9	NADYA MAULANI MELYANA, A.Md. A.P	19960325 202012 2 003	Pengelola Perkara	Pengatur (II/c)
83	10	DWI NOVIANDARU, A.Md	19971113 202012 1 003	Pengelola Sistem dan Jaringan	Pengatur (II/c)
84	11	IRHAS HERY RIZKATILLAH, S.H.	19990524 202203 1 003	Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda (III/a)
85	12	INDAH MELINDA, A.Md.A.B.	19990429 202203 2 021	Pengelola Perkara	Pengatur (II/c)
86	13	TESA MONICA BR GULTOM, A.Md	19941212 202203 2 011	Pengelola Barang Milik Negara	Pengatur (II/c)

#### HAKIM AD HOC PHI

87	1	DIAH SUSILOWATI,SH	19660321 0220121 2 022	HAKIM AD HOC PHI	
88	2	HERI PURNOMO, S.Si	19700409 0220160 2 041	HAKIM AD HOC PHI	

#### HAKIM AD HOC TIPIKOR

89	1	BINSAR PANTAS P.S,SH	19750326 0220200 2 009	HAKIM AD HOC TIPIKOR	
90	2	RUDI, SH	19680418 0220130 4 002	HAKIM AD HOC TIPIKOR	

#### KONTRAK

91	1	DONI SURIPTO		SOPIR	
92	2	TUNJUNG SULAKSANA P		SOPIR	
93	3	FAHMI HIDAYAT, SH		SOPIR	

94	4	KEMAS INDARTO		SATPAM	
95	5	WIRIT WINOTO		SATPAM	
96	6	ARIF PRIHENDARTO		SATPAM	
97	7	BARIYAH		SATPAM	
98	8	BUDI PRASETYO		SATPAM	
99	9	ANDIK SULISTYO		SATPAM	
100	10	DENY DWI SUSILO		SATPAM	
101	11	PEBRIANTO		SATPAM	
102	12	SAPTO BAHTIAR		SATPAM	
103	13	ANGGA PERDANA PUTRA, SH		CLEANING SERVICE	
104	14	SUDARMADI		CLEANING SERVICE	
105	15	BAMBANG NUGROHO A MARTANTYO		CLEANING SERVICE	
106	16	DWI RIYANTO		CLEANING SERVICE	
107	17	NGADIYO		CLEANING SERVICE	
108	18	EDI SISWANTO		CLEANING SERVICE	
109	19	DIAH SUKORINI,SH		PRAMUBHAKTI	
110	20	NOVIA IKE DEVITA, S.Kom.		PRAMUBHAKTI	

Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan Jabatan

No	Satuan Kerja	Hakim					Teknis					Non Teknis			Jumlah
		Ketua	Wakil Ketua	Hakim	Hakim Ad Hoc Tipikor	Hakim Ad Hoc PHI	Panitera	Panitera Muda	Panitera Pengganti	Juru Sita	Juru Sita Pengganti	Sekretaris	Ka Sub Bagian	Staf	
1	PN YOGYAKARTA	1	1	21	2	2	1	5	26	7	5	1	3	15	90
Jumlah		1	1	21	2	2	1	5	26	7	5	1	3	15	90

Secara lebih terperinci, keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan berdasarkan Pangkat/Golongan dan Pendidikan adalah sebagai berikut:

Keadaan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

No	Satuan Kerja	Jenjang Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	
1	PN YOGYAKARTA	-	1	5	5	49	30	-	90
Jumlah		0	1	5	5	49	30	0	90

Keadaan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

No	Satuan Kerja	Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV					Jumlah
		I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
1	PN YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	6	-	5	7	8	31	6	6	12	5	-	86
Jumlah		0	0	0	0	0	0	6	0	5	7	8	31	6	6	12	5	0	86

PROMOSI / MUTASI

Rekapitulasi Promosi / Mutasi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Data Mutasi Hakim dan Pegawai

NO	NAMA	-TMT. MUTASI MASUK -JABATAN LAMA -JABATAN BARU	-TMT. MUTASI KELUAR -JABATAN LAMA -JABATAN BARU
1	2	3	4
1	WISNU KRISTIYANTO, SH.,MH	23-02-2022 - KETUA PN NANGA BULIK - HAKIM PN YOGYA	
2	NURYANTO, SH.,MH		07-03-2022 HAKIM PN YOGYA HAKIM PN BANDUNG
3	OCTAVIA MARIANA WIJAYANTI, SH.,MH	07-03-2022 PANMUD HUKUM PN PACITAN PP PN YOGYAKARTA	
4	TRI ASNURI HERKUTANTO, SH.,MH	07-03-2022 KPN MELONGUANE HAKIM PN YOGYAKARTA	
5	TASIMAN, SH.,MH	07-03-2022 SEKRETARIS PN SLEMAN SEKRETARIS PN YOGYAKARTA	
6	ERNA INDRAWATI, SH.,MH		09-03-2022 HAKIM PN YOGYA HAKIM PN SURAKARTA
7	SARI SUDARMI, SH		14-03-2022 HAKIM PN YOGYA HAKIM PN SEMARANG
8	NURYANTO		07-03-2022 HAKIM PN YOGYA HAKIM PN BANDUNG
9	MARIANA OCTAVIA WIJAYANTI, SH.,MH	07-03-2022 PP PN PACITAN PP PN YOGYAKARTA	
10	SHEILA POSITA, SH.,MH	14-03-2022 PP PN SLEMAN	

		PP PN YOGYAKARTA	
11	INDAH MELINDA, A.Md.A.B	01-04-2022 CPNS	
12	IRHAS HERY RIZKATILLAH, SH	01-04-2022 CPNS	
13	Dr.FRIDA ARIYANI, SH.,M.Hum		18-04-2022 KETUA PN YOGYA WKPN SEMARANG
14	TESA MONICA BR GULTOM, A.Md	22-04-2022 CPNS	
15	YULANTO PRAFIFTO UTOMO, SH.,MH	24-06-2022 KPN SANGATTA HAKIM PN YOGYAKARTA	
15	GABRIEL SIALLAGAN, SH.,MH	15-07-2022 KPN MARISA HAKIM PN YOGYAKARTA	
16	NANIK MULYANI, SH		18-11-2022 PANMUD TIPIKOR PN YOGYA PP PT YOGYAKARTA
17	FITRI RAMADHAN, SH	19-12-2022 HAKIM PN TANJUNG KARANG HAKIM PN YOGYAKARTA	
18	MUJIONO, SH.,MH	23-12-2022 WK PN SLEMAN KETUA PN YOGYAKARTA	

Data Pensiun / Meninggal Hakim Dan Pegawai

NO	NAMA	KETERANGAN PENSIUN / MENINGGAL DUNIA
1	2	4
1	NURIL HUDA,SH,M.HUM	-26-02-2022 HAKIM MENINGGAL DUNIA

2	TUNTUM RAHAYU, SH	-01-06-2022 PANITERA PENGGANTI PENSIUN
3	NARSIYO	-01-12-2022 JURUSITA PENGGANTI PENSIUN

Rekapitulasi Diklat Hakim Dan Pegawai

NO	NAMA	NAMA PELATIHAN	TEMPAT	TANGGAL
1	1. Agus Setiawan, SH.,Sp.Not 2. Yulanto Prafitto U, SH.,MH	FGD Diskusi Publik terhadap RKUHP	Hotel Merapi Merbabu Sleman	15 Agustus 2022
	3. Muh.Djauhar Setyadi, SH.,MH 4. Wisnu Kristiyanto, SH.,MH 5. Abdul Kadir Rumodar, SH 6. Tasiman, SH.,MH 7. Narti Hartati, SH 8. Ardi Wicaksono, ST 9. Dwi Novindaru	Sosialisasi Aplikasi E- Berpada	PT Yogyakarta	9 Agustus 2022
2	10. Tasiman, SH.,MH 11. Evendi Nugroho, ST 12. Yeti Eko Isbandiyah, SIP	Coaching Clinic Penyusunan DUPAK dan SKP	PT Yogyakarta	8 September 2022
	Yulanto Prafitto Utomo, SH.,MH	Prespektif Disabilitas dan Disabilitas Berhadapan dengan Hukum	Dinas P3AP2 DIY	13 sd 15 September 2022
	Yeti Eko Isbandiyah, SIP	Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian secara Online	Online	18 sd 31 Oktober 2022
3	Tasiman, SH.,MH	Pelatihan ECSCS	Online	17 sd 21 Oktober 2022
	Yulanto Prafitto Utomo, SH.,MH	FGD Penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak	Abadi Hotel Yogyakarta	20 Oktober 2022
4	1. Irhas Heri Rizkatillah, SH 2. Indah Melinda, A.Md 3. Tesa Monica BR Gultom, A.Md	Latsar CPNS	Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan Bogor	14 sd 18 November 2022

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eka Surya Setiawan, SH</li> <li>2. Widodo Budi S, SH</li> <li>3. Ardi Wicaksono, SH</li> <li>4. Dwi Noviandaru, A.Md</li> </ol>	Bimtek SAKIP	Hotel Cavinton Yogyakarta	16 sd 18 November 2022
5	Yenny Vikky Efendy, ST, SH.,M.Eng	Pengembangan Aplikasi SPPT-TI	Banten	10 sd 29 Oktober 2022
6	Yulanto Prafitto Utomo, SH.,MH	Sertifikasi Hakim Tipikor	Satuan Kerja Masing-masing dan di Puslitbangdiklat Kumdil Mega Mendung	21 November s.d 10 Desember 2022
7	Wisnu Kristiyanto, SH.,MH	Sertifikasi Hakim Tipikor	Satuan Kerja Masing-masing dan di Puslitbangdiklat Kumdil Mega Mendung	21 November s.d 10 Desember 2022
8	Diah Susilowati, SH	Sertifikasi Hakim Tipikor	Satuan Kerja Masing-masing dan di Puslitbangdiklat Kumdil Mega Mendung	21 November s.d 10 Desember 2022
9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abdul Kadir Rumodar, SH</li> <li>2. Heri Prasetya, SH</li> <li>3. Lusi Rachmayani, SH</li> <li>4. Arlyo Perdana Putra, SH</li> <li>5. Nanang Supriyadi, SE.,SH.,M.Kn</li> <li>6. Salasa Agus Ekoyadi, SH</li> <li>7. Nurmaya Rezeky, SH</li> </ol>	FGD Kepaniteraan	Grand Inna Hotel Yogyakarta	11 sd 13 Desember 2022
10	Dian Umawati, SH.,MH	Pelatihan Teknis Yudisial EksekusiPerdata bagi Panitera Muda Perdata dan Jurusita	Online	11 sd 15 Juli 2022
11	Agus Setiawan, SH.,Sp.Not	Platihan Teknis Yustisial TPPU	Satuan Kerja Masing-masing dan di Puslitbangdiklat Kumdil Mega Mendung	25 Juli sd 5 Agustus 2022

12	Tasiman, SH.,MH	Pendampingan Penyusunan RKA-K/L Pagu Indikatif TA 2023	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	17-Jun-22
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan SDM	Griya Persada Convention & Resort Kaliurang Jl. Boyong No.99 Kaliurang Hargobinangun pakem Sleman	18 Mei 2022 - 20 Mei 2022
13	Dwi Noviandaru, A.Md	Pendampingan Penyusunan RKA-K/L Pagu Indikatif TA 2023	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	17-Jun-22
		Sosialisasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu)	Kantor (online)	14-Jun-22
		Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik se DIY Tahun 2022	Kantor (online)	19-Apr-22
14	Yulanto Prafitto Utomo, SH.,MH	Workshop Konsinyering Perumusan Kerangka Acuan Kerja Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (RAN-PKDRT)	Crystal Lotus Hotel Yogyakarta Jl.Magelang KM.5.2 Sinduadi Mlati Sleman	29-Jun-22
15	Heri Kurniawan, SH.,MH			
		Webinar Penganggaran Pengadilan Berbasis Kinerja	Kantor (Online)	14-Apr-22
		Workshop Finalisasi Sistem Rujukan Ideal Bagi Perempuan dan Anak Dengan Disability	Prime Plaza Hotel Jogjakarta Jl.Affandi Gejayan Complex Colombo Jogjayakarta	24-Mar-22
		Webinar dengan tajuk "Menegaskan Keadilan Bagi Perempuan Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum"	Kantor (Online)	22-Mar-22
		Workshop Peningkatan Kapasitas Anggota Forum SPPA di Kota Yogyakarta	Ruang Utama Atas, Bima, Kompleks Balaikota Yogyakarta	23-Feb-22
		Pelatihan Mainstreaming Disability dan Aksesibilitas Untuk Pengadilan	Kantor (Online)	15-Jul-22
16	Tri Asnuri Herkutanto, SH.,MH	Seminar dan Webinar secara hybrid AKPI-FH UGM	Ruang Utama Atas, Bima, Kompleks Balaikota Yogyakarta	30-Jun-22

17	Aryo Perdana Putra, SH	Pelatihan Teknis Yudisial Jurisita/Jurusita Pengganti Peradilan Umum Seluruh Indonesia	Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung	27 Juni 2022 - 01 Juli 2022 04 Juli 2022 -08 Juli 2022
18	Muh.Djauhar Setyadi, SH.MH	Sosialisasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu)	Kantor (Online)	20-Jun-22
19		Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik se DIY Tahun 2022	Kantor (Online)	22-Mar-22
20		Sosialisasi Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas	Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta	02-Jun-22

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**A. PENGELOLAAN KEUANGAN DIPA**

REKAPITULASI  
 LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA  
 TAHUN ANGGARAN 2021 DAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN 2021				TAHUN 2022			
		PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA	PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%	Rp
	B. Pegawai	16.560.475.000	16.337.263.363	98,65	223.211.637	13.610.257.000	13.566.663.049	99,68	59.327.469
	B. Barang Opr	2.583.017.000	2.559.839.490	99,10	23.177.510	2.985.721.000	2970163342	99,48	43.593.951
	B. Barang Non Opr	24.600.000	24.464.296	99,45	135.704	27.500.000	27.324.140	99,36	175.860
	B. Modal	265.000.000	264.961.000	99,98	39.000	361.000.000	360.840.000	99,96	160.000
	Jumlah 01	19.433.092.000	19.186.528.149	98,73	246.563.851	16.984.478.000	16.924.990.531	99,62	246.563.851
	B. Barang (03)	226.904.000	224.610.819	98,99	2.293.181	300.860.000	295.219.810	98,13	5.640.190
	Jumlah 03	226.904.000	224.610.819	98,99	2.293.181	300.860.000	295.219.810	98,13	5.640.190
	Jumlah 01 + 03	19.663.372.000	265.896.557	98,61	2.680.000	17.285.338.000	17.220.210.341	98,87	252.204.041

Keterangan :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

1. Belanja Pegawai

Terjadi sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp 43.595.362,- untuk belanja pegawai karena pagu tersebut sudah dialokasikan untuk tambahan pegawai pindah yang masuk ke PN Yogyakarta, namun sampai dengan pembayaran gaji Desember 2022, tidak ada pegawai yang masuk ke PN Yogyakarta

2. Belanja Barang Operasional

Terdapat sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp 15.557.658,- untuk Belanja Barang Operasional karena :

1. Anggaran perjalanan dinas masih tersisa, dikarenakan tidak banyak perjalanan dinas
2. Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin masih tersisa.

3. Belanja Barang Non Operasional

Terdapat sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp 175.860,- untuk belanja pegawai karena semua belanja telah di maksimalkan.

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Terjadi sisa pagu penyerapan anggaran sebesar Rp 160.000,- untuk belanja modal karena sudah maksimal.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Terjadi sisa pagu anggaran sebesar Rp 5.640.190,- dalam manajemen peradilan (DIPA Badan Peradilan Umum)/ Belanja Barang karena terdapat sisa dalam penyelesaian perkara karena hal-hal sebagai berikut :

1. 1049.005.003.051 : Dalam belanja Pendaftaran berkas perkara sebesar Rp 22.700,- karena semua belanja telah terbayarkan seluruhnya
2. 1049.005.004.054 : Dalam belanja Pemeriksaan di sidang pengadilan sebesar Rp 140.000,- karena semua belanja telah terbayarkan seluruhnya
3. 1049.005.004.057 : Dalam belanja Penanganan perkara tingkat banding sebesar Rp 26.500,- karena semua belanja telah terbayarkan seluruhnya
4. 1049.005.005.052 : Dalam belanja penetapan hari sidang sebesar Rp 0,- Karena semua belanja telah terbayarkan seluruhnya.
5. 1049.005.004.057 : Dalam belanja Penanganan perkara tingkat banding sebesar Rp 26.500,- karena semua perkara telah terbayarkan seluruhnya
6. 1049.005.005.057 : Dalam belanja Eksekusi putusan pengadilan sebesar Rp 785.000,- karena seluruh perkara telah terbayarkan seluruhnya

REKAPITULASI  
LAPORAN REALISASI PENGELOLAAN PENDAPATAN PNBP  
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN TAHUN ANGGARAN 2022  
DIPA 01

NO.	AKUN & URAIAN PENDAPATAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENDAPATAN	
		ESTIMASI PENDAPATAN	PENERIMAAN	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	19.580.000	-	19.970.000	390.000	3.64%
2	425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	0	-	351.050	351.050	100%
	JUMLAH	-	19.580.000	-	20.321.050	741.050	3.64%

Penjelasan :

1. Akun 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

Terdapat kenaikan penerimaan pendapatan sebesar Rp 390.000 (3.64 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan pendapatan sewa tanah, Gedung dan bangunan karena Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta jumlahnya bertambah di tahun 2022, sehingga mempengaruhi jumlah pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

REKAPITULASI  
LAPORAN REALISASI PENGELOLAAN PENDAPATAN PNBP  
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN TAHUN ANGGARAN 2022  
DIPA 03

NO.	AKUN & URAIAN PENDAPATAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENDAPATAN	
		ESTIMASI PENDAPATAN	PENERIMAAN	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	425231 Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	-	-	-	90,000	90.000	100
2	425232 Pendapatan Uang meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan		7.640.000		7,000,000	-640.000	-9.14
3	425233 Pendapatan Ongkos Perkara		19.785.000		23,700,000	3.915.000	16.51
4	425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya		65.788.300		64,476,400	-1.311.900	-2.03
	JUMLAH	-	93.213.300	-	95.176.490	2.053.100	2.157%

Penjelasan :

1. Akun 425231 Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan

Terdapat kenaikan penerimaan pendapatan sebesar Rp 90.000 (100 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan Pendapatan Pengesahan Surat dibawah tangan karena terjadi penurunan permintaan dikarenakan dapat melakukan pengunduhan (download) secara mandiri melalui sistem e-Court.

2. Akun 425232 Pendapatan Pendapatan Uang meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan terdapat penurunan penerimaan pendapatan sebesar Rp 640.000 (9.14 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera karena ada penurunan permohonan leges Tahun 2022.
3. Akun 425233 Pendapatan Ongkos Perkara  
Terdapat kenaikan penerimaan pendapatan sebesar Rp 3.915.000 (16.51 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan pendapatan ongkos perkara karena kenaikan jumlah perkara di Tahun 2022.
4. Akun 425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya  
Terdapat penurunan penerimaan pendapatan sebesar Rp -1.311.900 (-2.03 %) dibanding tahun lalu karena perubahan mekanisme kerja (ecourt, eberpadu) dan penurunan pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya di Tahun 202.

**B. PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA**

Uraian	Keadaan Keuangan				Keterangan
	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	
Saldo Awal	631.231.947,84				
Penerimaan		721.069.990,00			
Biaya Proses/ATK/Pemberkasan*)			47.100.000,00		
Biaya Panggilan			140.486.000,00		
Biaya Penerjemah			-		
Biaya Pemberitahuan			116.350.800,00		
Biaya Sita			-		
Biaya Pemeriksaan Setempat			18.573.000,00		
Biaya Sumpah			19.750.000,00		
Biaya Saksi Ahli			-		
Biaya Pengiriman			38.840.000,00		
Biaya Materai			5.750.000,00		
PNBP Biaya Pendaftaran			23.740.000,00		
PNBP Redaksi			5.750.000,00		
PNBP Lain-lain			22.635.500,00		
Pengembalian Sisa Panjar			247.325.400,00		
Biaya Lain-lain			23.955.000,00		
Saldo Akhir				642.046.237,84	
<b>Jumlah</b>	<b>631.231.947,84</b>	<b>721.069.990,00</b>	<b>710.255.700,00</b>	<b>642.046.237,84</b>	

BIAYA EKSEKUSI PERDATA

Uraian	Keadaan Keuangan				Keterangan
	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	
Saldo Awal	7.596.846.374,00				
Penerimaan		54.406.000,00			
Biaya Materai			390.000,00		
Biaya Leges			-		
Biaya Sita Eksekusi			2.945.000,00		
Biaya Juru Sita			6.450.000,00		
Biaya Pengumuman Lelang/Iklan			-		
Biaya Juru Lelang			-		
Biaya Lelang			-		
Biaya Saksi			4.600.000,00		
Biaya Pemberitahuan			12.106.000,00		
Biaya Keamanan			-		
Pengembalian Sisa Panjar Eksekusi			43.999.000,00		
PNBP			1.490.000,00		
Lain-lain			6.899.365.500,00		
Saldo Akhir				679.906.874,00	
<b>Jumlah</b>	<b>7.596.846.374,00</b>	<b>54.406.000,00</b>	<b>6.971.345.500,00</b>	<b>679.906.874,00</b>	

#### BIAYA KONSIGNASI

Uraian	Keadaan Keuangan				Keterangan
	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	
Saldo Awal	7.032.873.251,00				
Penerimaan (Uang Konsinyasi dan Panjar Konsinyasi)		-			

Biaya Pelaksanaan Penawaran			-	
Biaya pendaftaran			-	
Biaya Proses/ATK			-	
Redaksi			-	
Materai			-	
Leges			-	
Pengambilan Uang Konsinyasi			-	
Biaya Lain-lain			-	
Saldo Akhir				7.032.873.251,00
Jumlah	7.032.873.251,00	0,00	0,00	7.032.873.251,00

#### BIAYA PERDATA KHUSUS (PHI)

Uraian	Keadaan Keuangan				Keterangan
	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	
Saldo Awal	5.689.000,00				
Penerimaan		11.280.000,00			
Biaya Proses/ATK/Pemberkasan*)			675.000,00		
Biaya Panggilan			380.000,00		
Biaya Penerjemah			-		
Biaya Pemberitahuan			1.780.000,00		
Biaya Sita			-		
Biaya Pemeriksaan Setempat			-		
Biaya Sumpah			100.000,00		
Biaya Saksi Ahli			-		
Biaya Pengiriman			400.000,00		
Biaya Materai			20.000,00		
PNBP Biaya Pendaftaran			130.000,00		
PNBP Redaksi			20.000,00		

PNBP Lain-lain			150.000,00	
Pengembalian Sisa Panjar			4.365.000,00	
Biaya Lain-lain			4.576.000,00	
Saldo Akhir				4.373.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.689.000,00</b>	<b>11.280.000,00</b>	<b>12.596.000,00</b>	<b>4.373.000,00</b>

#### BIAYA EKSEKUSI PERDATA KHUSUS (PHI)

Uraian	Keadaan Keuangan				Keterangan
	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	
Saldo Awal	4.296.000,00				
Penerimaan		6.655.000,00			
Biaya Materai			10.000,00		
Biaya Leges			10.000,00		
Biaya Sita Eksekusi			10.000,00		
Biaya Juru Sita			500.000,00		
Biaya Pengumuman Lelang/Iklan			-		
Biaya Juru Lelang			-		
Biaya Lelang			-		
Biaya Saksi			-		
Biaya Pemberitahuan			-		
Biaya Keamanan			-		
Pengembalian Sisa Panjar Eksekusi			2.895.000,00		
PNBP			75.000,00		
Lain-lain			-		
Saldo Akhir				7.451.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>4.296.000,00</b>	<b>6.655.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>7.451.000,00</b>	

REKAP BIAYA PERKARA PERDATA

Uraian	Keadaan Keuangan					
	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	Kas di Brankas
Biaya Perkara	631.231.947,84	721.069.990,00	710.255.700,00	642.046.237,84		
Biaya Eksekusi	7.596.846.374,00	54.406.000,00	6.971.345.500,00	679.906.874,00		
Biaya Konsinyasi	7.032.873.251,00	0,00	0,00	7.032.873.251,00		
Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00	0,00	0,00	0,00		
PHI*)	9.985.000,00	17.935.000,00	16.096.000,00	11.824.000,00		

### C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

#### 1. Daftar Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2022

Ada 2 (dua) gedung Kantor, yang pertama Gedung Kantor Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA Jl. Kapas No. 10 Yogyakarta dibangun diatas tanah seluas 7385 m2, terdiri dari 2 (dua) lantai, dan gedung Tipikor di Jl Prof Dr Soepomo 12 Yogyakarta dibangun diatas tanah seluas 3163 m2 dengan rincian sarana dan prasara gedung dan fasilitas perkantoran sebagai berikut:

##### a. Tanah dan Bangunan

No	Satker	Luas Tanah (m2)	Bangunan (m2)	Peruntukan	Pemegang Hak Atas Tanah
1	PN Yogyakarta	3163	1900	Gedung Tipikor dan PHI	Pemerintah RI Cq. MA RI
		7385	3610	Gedung Kantor	Pemerintah RI Cq. MA RI

##### b. Rumah Negara

No	Satker	Jumlah	Kondisi			Pemegang Hak Atas Tanah
			Baik	Rusak	Rusak Berat	
1	PN Yogyakarta	19	8	11	-	Pemerintah RI Cq. MA RI

##### c. Kendaraan Dinas Roda 2

No	Satker	Merk	Type	Jumlah	Kondisi
1	PN Yogyakarta	Honda	Supra	3	Baik
			GL III SPORT	1	Baik
			Supra Fit X	1	Baik
			Supra Fit	4	Baik
			GP III Mega Pro	2	Baik
			NF 100 D	1	Baik
Jumlah				12	

##### d. Kendaraan Dinas Roda 4

No	Satker	Merk	Type	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	PN Yogyakarta	Toyota	Altis	2	Baik	1 Unit sewa
			Vios	2	Baik	
			Innova G	1	Baik	
			Innova V	1	Baik	
			Kijang KF 40	1	Baik	Pinjam pakai Pemkot
			Kijang LX	1	Baik	
Jumlah				8		

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2022

No	Satker	Jenis Pengadaan
1	PN Yogyakarta	26 Unit PC
		2 Unit Printer

3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2022

No	Satker	Jenis Pemeliharaan	Keterangan
1	PN Yogyakarta	Pengecatan Pos Satpam Gedung Tipikor	
		Pemeliharaan Atap Selasar Gedung Kantor Pengadilan	
		Pemeliharaan Ruang Jaksa	
		Pemeliharaan Toilet	
		Pemeliharaan Ruang Rapat berupa penggantian wallpaper	
		Pemeliharaan Tower Air dan Ruang Genset	
		Pemeliharaan PTSP (Meja e-Berpadu & Layanan disabilitas)	
		Pemeliharaan Keramik Selasar Lantai Dua	
		Pengecatan Gedung Aula	
		Pemeliharaan Parkir Gedung Tipikor	
		Pemeliharaan Atap Tangga	
		Pemeliharaan Ruang Mediasi berupa penggantian Wallpaper	
		Pemeliharaan PTSP (Sekat Ruang Tunggu)	
		Pemeliharaan Kantin Selatan	
		Pemeliharaan PTSP (Backdrop panel listrik)	
		Penggantian Keramik Aula	
Pekerjaan Ruang Sidang Candra			

4. Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2022

No	Satker	Tanggal	Jenis Barang	Keterangan
1	PN Yogyakarta	-	-	-

5. Daftar Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2022

No	Nama Barang	Pengadaan 2022	Jumlah 2022
1	Komputer	26	121
2	Laptop		58
3	Infokus/LCD		2
4	PABX		3
5	Mesin Ketik		25

6	Mesin Stensil	-
7	Mesin Fotokopi	2
8	AC	64
9	Faximile	6
10	Brankas	5
11	Sound System	8
12	Mesin Absensi	3
13	Tabung Pemadam Api	1
14	CCTV	5
15	UPS	5
16	Genset	2
17	Handy Cam	2
18	Pesawat Telepon	2
19	Printer	43
20	Scanner	8
21	Server	3
22	Lemari Kayu	73
23	Lemari Besi	30
24	Filling Kabinet Kayu	-
25	Filling Kabinet Besi	25
26	Buffet	8
27	Rak	74
28	Meja Kerja Kayu	233
29	Kursi Kayu	68
30	Kursi Besi Metal	544
31	Sice	17
32	Bangku Panjang Kayu	64
33	Meja Rapat	3
34	Meja Komputer	12
35	Meja Resepsionis	5
36	Mesin Absensi Sidik Jari	-
37	Kamera	2
38	HT	4
39	Sekat	7
40	Meja Sidang	-
41	Kursi Hakim	-
42	Meja Telepon	3
43	Mesin Hitung	1
44	Kipas Angin	28
45	Televisi	19
46	RIG	-
47	Kulkas	2
48	External Hardisk	-
49	Hardisk	-
50	Anti Virus	-
51	Access Point	9
52	Rak Server	1
53	Router	4
54	Air Curtain	0
55	Swith Hub 24 Port	

## 6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2022

No	Satker	Jenis Pemeliharaan	Keterangan
1	PN Yogyakarta	Pemeliharaan Peralatan Mesin:	
		Perawatan kendaraan dinas	
		Perawatan genset	
		Perawatan AC, PC, Printer, Fotokopi, Soundsystem	
		Pemeliharaan Jaringan Internet:	
		Jaringan CCTV	

### D. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk mendorong terwujudnya Badan Peradilan yang Agung, Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA melakukan pembenahan Teknologi Informasi ( TI ) sebagai salah satu prioritas perubahan, yang diharapkan dapat memiliki Sistem informasi yang menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu. Kebijakan yang diambil salah satunya adalah dengan pendampingan secara terus menerus baik dari tingkat supervisi, operator maupun user dalam implementasi dari masing - masing aplikasi dilakukan secara rutin. Sedangkan sarana dan prasarana teknologi informasi yang digunakan diantaranya yaitu:

#### 1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Manajemen administrasi perkara diinternal Pengadilan Negeri Yogyakarta dijalankan oleh seluruh kepaniteraan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA beserta Panitera Pengganti dengan dukungan dari bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan. Sampai saat ini Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA telah menerapkan SIPP versi 5.1.0 yang telah terintegrasi dengan SIPP Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun Mahkamah Agung baik SIAP maupun Direktori Putusan MA. Data sudah termutakhirkan berdasarkan kondisi data perkara yang sebenarnya. Dalam implementasi SIPP, diadakan pelatihan, evaluasi dan monitoring. Indikator kinerja, kepatuhan pemasukan (input) data, kelengkapan data dan validasi data adalah prasyarat mutlak dalam pengisian SIPP. Keempat indikator tersebut menjadikan implementasi SIPP tidak cukup sekedar mengejar warna hijau semata, terlebih dilakukan dengan cara-cara yang tidak semestinya.

**Sistem Informasi Penelusuran Perkara**  
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Silamat Datang Anda Login Sebagai **Super Administrator** **Keluar**

Home | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana Umum | Pidana Khusus | SPPT | Delegasi | Laporan | Jadwal Sidang | Arsip Perkara | Antrian | e-Court | e-Payment | Referensi | System | Help

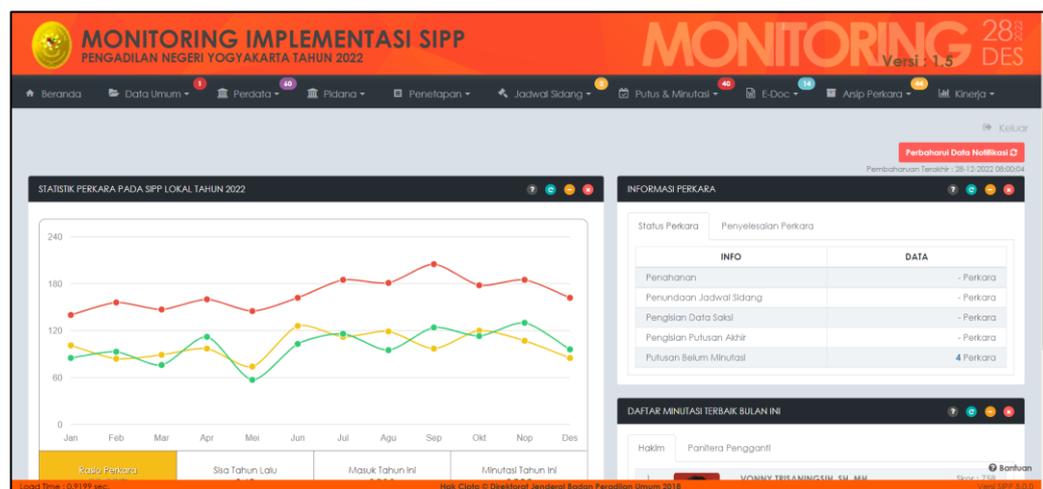
**DAFTAR PERKARA PERMOHONAN BANDING GUGATAN DAN PERLAWANAN/BANTAHAN (DERDEN VERZET)** Total : 406

Ketik kata kunci

No	Nomor Perkara PN	Pemohon Banding	Tanggal Pengiriman Berkas	Tanggal Putusan Banding	Nomor Perkara Banding	Tanggal Penerimaan Kembali Berkas	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Status Banding	Link
1	110/Pdt.G/2022/PN Yyk (e-Court)	02 Jan 2023 IBNU AGUS TRIANTA, S.H.MH., Kuasa dari Penggugat: Ny. JATINEM alias YATINEM SAPARIDI						Permohonan Banding	<a href="#">[detil]</a>
2	112/Pdt.G/2022/PN Yyk (e-Court)	21 Dec 2022 CHARISMA WEYOGI ARIESTA DEWI, Kuasa dari Tergugat: Bank Mandiri KCP Yogyakarta Katamsa Indonesia og PT Bank Mandiri (Persero) Tbk						Penerimaan Memori Banding	<a href="#">[detil]</a>
3	63/Pdt.G/2022/PN Yyk	19 Dec 2022 AMIRUDIN ROHMAT, SH.,MH. Kuasa dari Penggugat: Drs. H. TOTO SUNYOTO, SH.,MM Kambes Pol Purn						Penerimaan Memori Banding	<a href="#">[detil]</a>
4	108/Pdt.G/2022/PN Yyk	12 Dec 2022 CHANDRA SIAGIAN, SH., MH. Kuasa dari Penggugat: Dra Hj SUHARTI MM						Perberitahuan Untuk Memeriksa Berkas(Inzage)	<a href="#">[detil]</a>
5	72/Pdt.G/2022/PN Yyk	06 Dec 2022 NUSYIE KUSUMA INDAH JAYANTI, SH, MHum, MSc. Kuasa dari Penggugat: Ny. NGE MING HIE						Perberitahuan Untuk Memeriksa Berkas(Inzage)	<a href="#">[detil]</a>
6	91/Pdt.G/2022/PN Yyk (e-Court)	29 Nov 2022 CHANDRA SIAGIAN, Kuasa dari Penggugat: Sullyanto							<a href="#">[detil]</a>

## 2. MIS

Monitoring Implementasi SIPP (MIS) adalah sebuah aplikasi turunan dari SIPP yang digunakan untuk memonitoring dan evaluasi implementasi SIPP di pengadilan. Fitur-fitur aplikasi monitoring ini sangat membantu dalam evaluasi dan pengawasan internal dalam penggunaan dari SIPP.



## 3. e-Court

e-Court merupakan layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.



#### 4. e-Berpadu

Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT, Pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah meluncurkan Aplikasi E-Court yang kemudian pada tahun 2019 disempurnakan dengan e-Litigation dan upaya hukum banding secara elektronik. Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
- b. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Pengeledahan
- c. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan
- d. Pengajuan Perpanjangan Penahanan
- e. Penangguhan Penahanan
- f. Permohonan Pembantaran Penahanan
- g. Permohonan Penetapan Diversi
- h. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
- i. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan



5. Website Pengadilan

Website pengadilan berisi profil, transparansi laporan, kegiatan, berita pengadilan, persyaratan, info perkara, putusan dan pengumuman Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA. Website Pengadilan Negeri Yogyakarta telah dilengkapi dengan screen reader untuk penyandang Disabilitas.



6. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Direktori Putusan adalah sistem berbasis situs web yang dimiliki oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusan Mahkamah Agung dan seluruh putusan pengadilan dari empat lingkungan peradilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding di seluruh Indonesia.



## 7. Eraterang

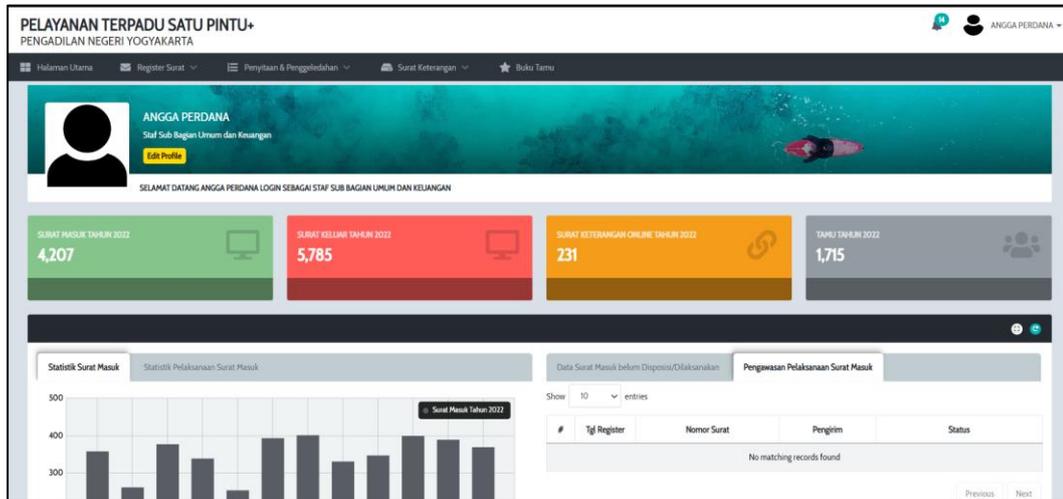
Eraterang merupakan sebuah aplikasi online yang fungsinya berguna untuk mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan. Kewajiban penerapan Eraterang tertuang dalam SK Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Plus (PTSP+) Dan Surat Keterangan Elektronik (ERATERANG) Di Lingkungan Peradilan Umum, bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan peradilan.



## 8. Aplikasi PTSP

Sehubungan telah diterapkannya sistem Pelayanan Terpadu Satu beberapa pengadilan negeri dalam rangka memberikan layanan prima terhadap para pencari keadilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengembangkan aplikasi Persuratan yang dapat digunakan untuk mendukung Pelayanan (PTSP) tersebut. Adapun fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi tersebut adalah sebagai:

1. Register surat masuk dan surat keluar
2. Register bukur tamu
3. Pembuatan Surat Keterangan yang telah terstandarisasi antara lain
  - a. Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit
  - b. Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana
  - c. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya
  - d. Surat Keterangan dipidana karena kealpaan ringan atau
  - e. Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan utang
4. Izin Penyitnan/Penggeledahan



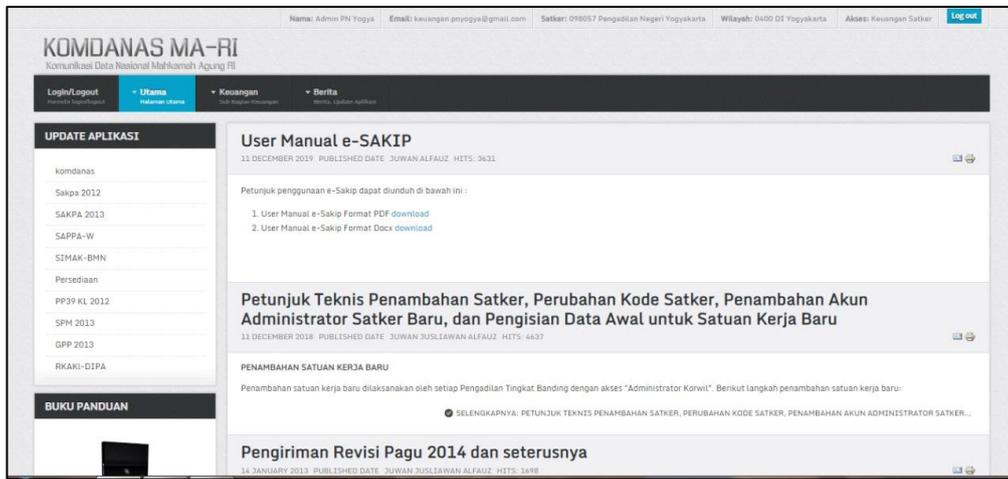
## 9. SAKTI

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.



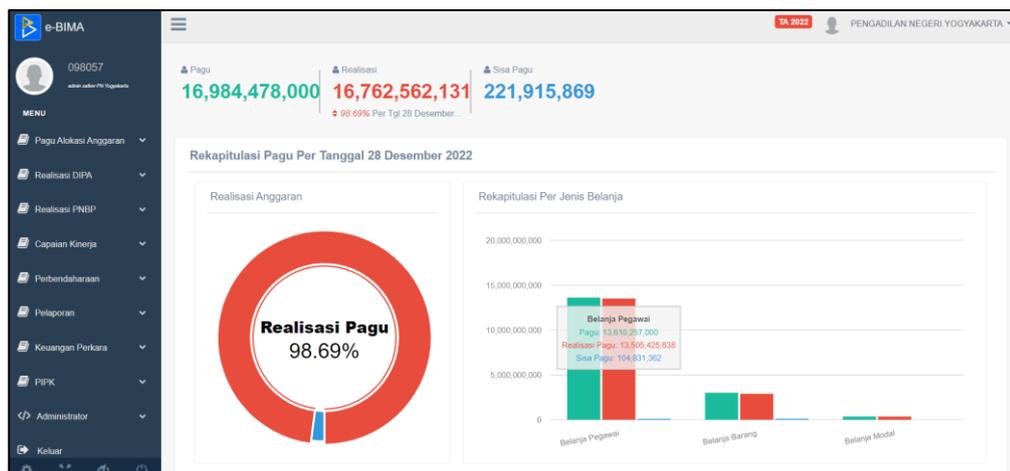
## 10. Komdanas

Merupakan aplikasi laporan kegiatan dan komunikasi data nasional bagian Kepegawaian, Keuangan dan Umum, Perencanaan, IT dan Pelaporan serta Kepaniteraan Peradana yang terintegrasi.



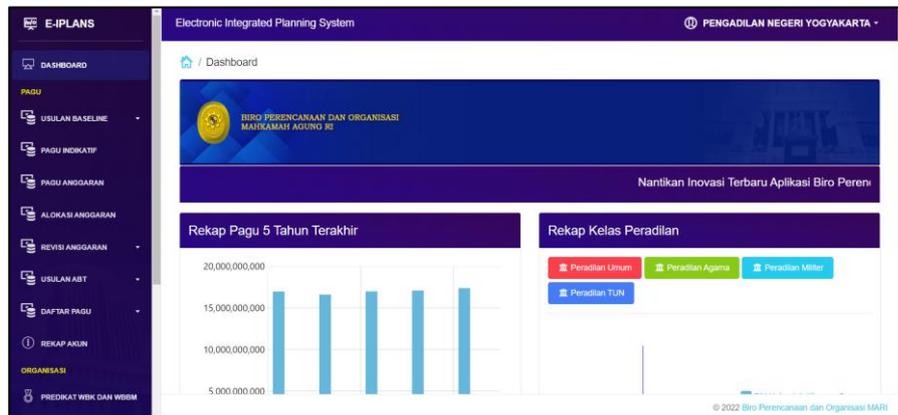
## 11. e-Bima

E-BIMA merupakan suatu sistem yang dibangun sebagai sarana bantu untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, keuangan perkara, dan uang titipan pihak ketiga, sehingga dapat memudahkan para Pimpinan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan monitoring secara akurat dan real time.



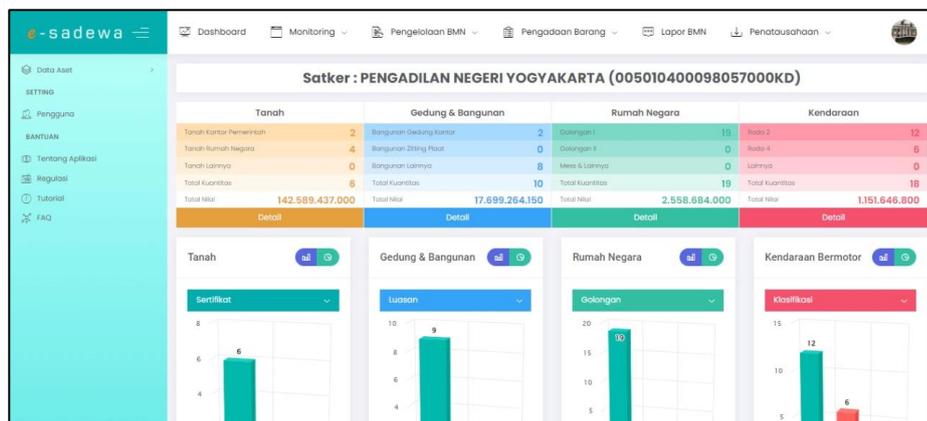
## 12. e-Iplans

E-IPLANS (Electronic Integrated Planning System) merupakan sebuah sistem untuk menyusun anggaran dengan tahapan berjenjang pada satuan kerja dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.



## 13. e-Sadewa

Aplikasi e-SADEWA merupakan transformasi dari aplikasi SIPERMARI yang sebelumnya telah diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 99/KMA/SK/VII/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia.



## BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adapun program-program yang telah dilaksanakan antara lain:

### A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Yogyakarta melakukan berbagai upaya demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Salah satunya adalah mengikuti program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan peradilan Umum. Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk Ditjen Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesian Court Performance Excellent/ICPE).

Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu: 1) Kepemimpinan (leadership); 2) Perencanaan Strategis (strategic planning); 3) Fokus Pelanggan (customer focus); 4) Sistem Dokumentasi (document system); 5) Manajemen Sumber Daya (resource management); 6) Manajemen Proses (process management); dan 7) Hasil Kinerja (performance results).

Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 2016 mendapatkan nilai A (Excellent) sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Nomor : TAPM.007/QMR/SERTIFIKAT/09/2016

Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Umum ini dilakukan penilaian kembali setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan 29 Agustus 2021 dengan rencana audit surveillance pada :

Bulan Februari Tahun 2017

Bulan Agustus Tahun 2017

Bulan Februari Tahun 2018

Bulan Agustus Tahun 2018

Bulan Februari Tahun 2020

Bulan Agustus Tahun 2021



Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Umum

Pada Tanggal 6-10 September 2022, Tim Asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum melakukan assesmen di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nilai 717

## B. REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia (aparatur).

Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindakan Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA mengimplementasikan program Reformasi Birokrasi dan telah dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei tahun 2018 yang telah di Asesor oleh Tim Reformasi dari Mahkamah Agung RI dengan Capaian 85,12 ( Delapan Puluh lima Koma Dua Belas) dengan nilai yang sangat baik.

## C. ZONA INTEGRITAS

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional, sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi yaitu (1) Birokrasi yang Bersih dari KKN dan Akuntabel, (2) Birokrasi yang Efektif dan Efisien, (3) Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Pengadilan Negeri Yogyakarta merupakan salah satu pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut.

Pengadilan Negeri Yogyakarta mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pengadilan Negeri Yogyakarta membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi secara baik sehingga mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja, dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik. Pada

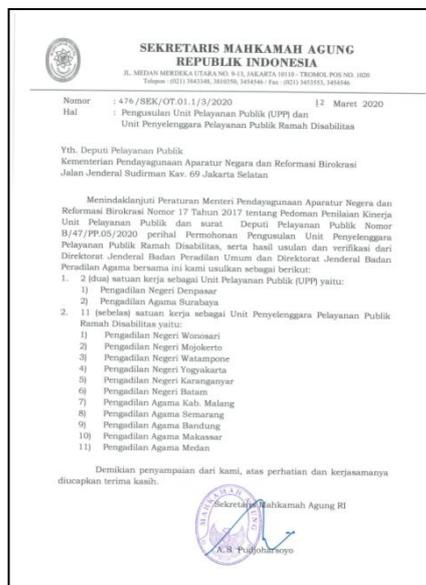
tahun 2019 Pengadilan Negeri Yogyakarta berkesempatan untuk mendapatkan predikat WBK. Sedangkan pada tahun 2021 dan Tahun 2022, Pengadilan Negeri Yogyakarta belum berkesempatan untuk mendapatkan predikat WBBM, namun demikian, tidak berhenti disini, pembangunan dan pemeliharaan Zona Integritas menuju WBBM tetap kami lanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

#### D. PILOT PROJECT RAMAH KAUM RENTAN / DISABILITAS

Penerapan pengadilan inklusif, yaitu layanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Tujuan :

Menjamin kehormatan, perlindungan, pemberdayaan, penegakan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas / kaum rentan yang berhadapan hukum



- ✓ Merupakan pilot project dari Kemenpan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Disabilitas sesuai dengan Surat Sekma No. 476/SEK/OT.01.1/3/2021 dan Surat Debuti Pelayanan Publik Nomor B/47/PP.05/2020 11 dari 910 pengadilan se indonesia
- ✓ Menjalin kerjasama MoU dengan pihak SADPA dalam rangka pendampingan disabilitas berhadapan hukum di dalam maupun di luar pengadilan dengan memberikan pendampingan psikososial dan proses pemulihan.
- ✓ Menjalin kerjasama dengan Pihak Pemerintah Kota Yogyakarta dengan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak yang berhadapan hukum.

- ✓ Menjalin Kerjasama dengan LSM Rifka Annisa berupa pendampingan psikososial dan atau bimbingan konseling terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum

## **MILESTONE PROGRAM PENGADILAN NEGERI MENUJU PELAYANAN PENGADILAN INKLUSIF**



### LANGKAH-LANGKAH YANG SUDAH DIAMBIL:

- ✓ Memberikan sosialisasi kepada para Hakim, Pegawai dan seluruh jajaran untuk dapat merubah mindset bahwa dalam pelayanan dan penanganan perempuan dan anak penyandang disabilitas harus didasarkan pada dasar hak asasi (right based) bukan atas dasar kasihan (charity based).
- ✓ Merubah perspektif bahwa penyandang difabel bukan lagi orang yang tidak dapat melakukan sesuatu seperti orang normal lainnya, melainkan orang yang dapat melakukan sesuatu dengan kemampuan yang berbeda.
- ✓ Sosialisasi kepada hakim dan pegawai mengenai pedoman mengadili perkara perempuan dan anak penyandang disabilitas.
- ✓ Memberikan sarana-prasarana yang akses dan ramah terhadap penyandang disabilitas.
- ✓ Mengidentifikasi adanya perlakuan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
- ✓ Perlakuan yang sama dalam system peradilan.

- ✓ Mengupayakan dan mengakomodasi keterangan penyandang difabel (tuna rungu) dengan menyediakan penerjemah tuna rungu

Kecamatan Subdistrict	Tunggal	Ganda	Multi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mantrijeron	200	11	0	211
Kraton	213	9	1	223
Mergansan	132	8	1	141
Umbulharjo	522	31	2	555
Kotagede	266	10	1	277
Gondokusuman	275	2	0	277
Danurejan	123	23	2	148
Pakualaman	100	19	1	120
Gondomanan	226	6	0	232
Ngampilan	109	10	4	123
Wirobrajan	279	19	2	300
Gedongtengen	239	2	1	242
Jetis	300	21	2	323
Tegalrejo	291	12	2	305
<b>Jumlah/Total</b>	<b>3275</b>	<b>183</b>	<b>19</b>	<b>3477</b>

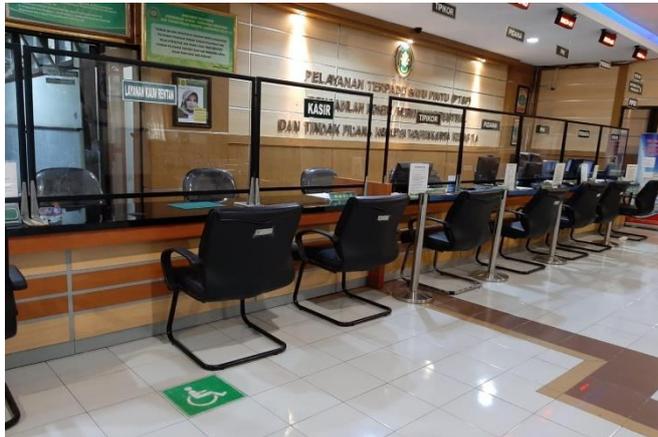
Catatan/Note : Pendataan dilakukan 2 (dua) tahun sekali.

Sumber: Dinas Sosial Kota Yogyakarta  
Source: The Social Welfare Services of Yogyakarta Municipality

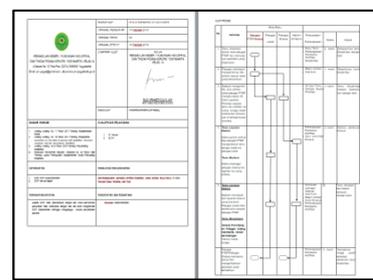
## SARANA – PRASARANA

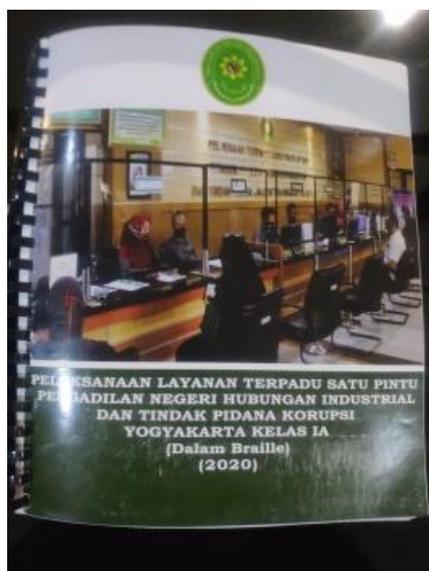
- ✓ Desk Pelayanan PTSP yang dapat diakses dan dijangkau penyandang disabilitas.
- ✓ Loket khusus untuk Pengguna Layanan Disabilitas
- ✓ Form disabilitas Pelayanan PTSP untuk pengguna layanan, sehingga dapat diketahui sejak awal kebutuhan alat bantu dan perlakuan apa yang harus diterapkan
- ✓ Posisi prioritas untuk penyandang disabilitas di persidangan
- ✓ Priority Seat yang dapat diakses dan dijangkau penyandang disabilitas.
- ✓ Kursi Roda dan Tongkat di lobby PTSP / Drop In Gedung
- ✓ Toilet Khusus dapat diakses dan dijangkau penyandang disabilitas.
- ✓ Jalur akses masuk ke gedung dapat diakses dan dijangkau penyandang disabilitas
- ✓ Video / audio visual untuk sosialisasi yang diterjemahkan dengan bahasa isyarat
- ✓ Situs Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan. Fitur AccessKey navigasi keyboard juga ditanamkan di situs ini bagi difabel mandiri
- ✓ SOP Penanganan Difabel

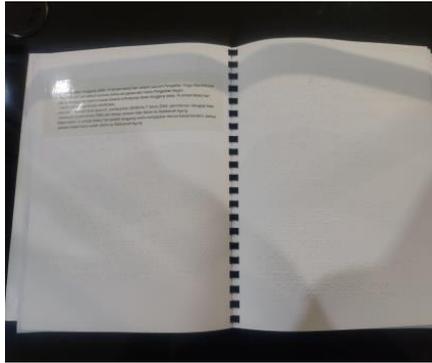
- ✓ Sosialisasi Penanganan Hukum Yang Ramah Dan Akses Bagi Perempuan Dan Anak Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum dengan Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 Oktober 2021
- ✓ Konsultasi dan Pengumpulan Data dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan tanggal 17 Oktober 2021 di Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh utusan Debuti Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Sekretariat Negara RI



<p><b>PERUSAHA PEJAKA</b></p> <p>1. Nama Lengkap (Maksimal 20 Karakter) : _____</p> <p>2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : _____</p> <p>3. Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) : _____</p> <p>4. Nomor Kartu Keluarga (KK) : _____</p> <p>5. Nomor Kartu Identitas Masyarakat (KIM) : _____</p> <p>6. Nomor Kartu Keluarga Bina (KK-Bina) : _____</p> <p>7. Nomor Kartu Identitas Penyandang Disabilitas (KIPD) : _____</p> <p>8. Nomor Kartu Identitas Penyandang Disabilitas (KIPD) : _____</p> <p>9. Nomor Kartu Identitas Penyandang Disabilitas (KIPD) : _____</p> <p>10. Nomor Kartu Identitas Penyandang Disabilitas (KIPD) : _____</p>	<p><b>PERUSAHA PESERTA</b></p> <p>1. Nama Lengkap (Maksimal 20 Karakter) : _____</p> <p>2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : _____</p> <p>3. Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) : _____</p> <p>4. Nomor Kartu Keluarga (KK) : _____</p> <p>5. Nomor Kartu Identitas Masyarakat (KIM) : _____</p> <p>6. Nomor Kartu Keluarga Bina (KK-Bina) : _____</p> <p>7. Nomor Kartu Identitas Penyandang Disabilitas (KIPD) : _____</p> <p>8. Nomor Kartu Identitas Penyandang Disabilitas (KIPD) : _____</p> <p>9. Nomor Kartu Identitas Penyandang Disabilitas (KIPD) : _____</p> <p>10. Nomor Kartu Identitas Penyandang Disabilitas (KIPD) : _____</p>	<p><b>PERUSAHA TPIKOR</b></p> <p>1. Nama Lengkap (Maksimal 20 Karakter) : _____</p> <p>2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : _____</p> <p>3. Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) : _____</p> <p>4. Nomor Kartu Keluarga (KK) : _____</p> <p>5. Nomor Kartu Identitas Masyarakat (KIM) : _____</p> <p>6. Nomor Kartu Keluarga Bina (KK-Bina) : _____</p> <p>7. Nomor Kartu Identitas Penyandang Disabilitas (KIPD) : _____</p> <p>8. Nomor Kartu Identitas Penyandang Disabilitas (KIPD) : _____</p> <p>9. Nomor Kartu Identitas Penyandang Disabilitas (KIPD) : _____</p> <p>10. Nomor Kartu Identitas Penyandang Disabilitas (KIPD) : _____</p>	<p><b>PERUSAHA PIH</b></p> <p>1. Nama Lengkap (Maksimal 20 Karakter) : _____</p> <p>2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : _____</p> <p>3. Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) : _____</p> <p>4. Nomor Kartu Keluarga (KK) : _____</p> <p>5. Nomor Kartu Identitas Masyarakat (KIM) : _____</p> <p>6. Nomor Kartu Keluarga Bina (KK-Bina) : _____</p> <p>7. Nomor Kartu Identitas Penyandang Disabilitas (KIPD) : _____</p> <p>8. Nomor Kartu Identitas Penyandang Disabilitas (KIPD) : _____</p> <p>9. Nomor Kartu Identitas Penyandang Disabilitas (KIPD) : _____</p> <p>10. Nomor Kartu Identitas Penyandang Disabilitas (KIPD) : _____</p>
---	--	---	--







**PENGUNAAN ISTILAH**

- Jadikan dia orang pertama
- Hindari penggunaan istilah seperti penghususan terhadap difabilitasnya "sibusu, sibuta, situli, dll atau bentuk bentuk fisik yang menantang




## E. EVALUASI PELAYANAN PUBLIK

Pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Yogyakarta belum mendapat kesempatan untuk menjadi satker uji petik terhadap Evaluasi Pelayanan Publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Namun demikian, Pengadilan Negeri Yogyakarta berusaha untuk tetap melakukan perbaikan berkelanjutan. Selain itu, untuk menjamin terwujudnya harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik, berdasarkan amanat UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Kementerian PAN RB melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini dilakukan untuk memberikan percontohan bagi unit penyelenggara pelayanan publik lainnya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Keenam aspek tersebut meliputi: Kebijakan pelayanan publik, Profesionalisme sumber daya manusia, Sarana dan prasarana, Sistem informasi pelayanan publik, Mekanisme konsultasi dan pengaduan, Inovasi pelayanan publik.

Indikator penilaian diperoleh dari persilangan antara aspek dan enam prinsip dalam melakukan evaluasi: Keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdayaguna, dan aksesibilitas.

Pada aspek kebijakan pelayanan, penilaian akan melihat pada standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan survei kepuasan masyarakat. "Standar pelayanan yang disusun harus melibatkan masyarakat dan dipublikasikan.

## F. POSBAKUM

Pos bantuan hukum adalah layanan yang dibentuk oleh setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap. Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Pengadilan harus

menyediakan akses bagi terdakwa yang sedang ditempatkan pada ruang tahanan Pengadilan untuk bisa mengakses layanan Posbakum Pengadilan.

Pos Layanan Hukum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Anggaran Posbakum Pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tertuang dalam DIPA No.005.03.099128/2021.

Dalam tahun 2022, alokasi anggaran yang tersedia sejumlah Rp. 48.000.000,00 dan telah terealisasi Rp. 48.000.000,00 terdapat 903 kegiatan dengan jenis pelayanan advice, konsultasi, pembuatan dokumen hukum.

Pelayanan dari Posbakum adalah sebagai berikut:

- a. Melayani konsultasi hukum baik perkara pidana maupun perdata
- b. Membantu pembuatan dokumen hukum
- c. Memberikan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang Pengadilan Negeri
- d. Memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan Negeri Masyarakat tidak mampu secara ekonomi hanya perlu menyiapkan salah satu dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Keterangan Tidak Mampu
  - b. Jamkesmas/KKM/Kartu Raskin/PKH
  - c. Dokumen lain yang terkait dengan keterangan tidak mampu.

## G. INOVASI & KREATIVITAS PELAYANAN

### I. INOVASI PROSES

#### a. PERUBAHAN DARI PELAYANAN SATU ATAP MENJADI PELAYANAN SATU PINTU

Untuk meningkatkan pelayanan yang prima, Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas I A telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyatukan pelayanan yang tersebar di beberapa kepaniteraan disatukan dalam satu pintu dan satu tempat mulai dari proses permohonan /pelimpahan perkara sampai terbitnya dokumen /selesaiannya proses (ONE STOP SERVICE). Pelayanan dilaksanakan dalam satu meja pelayanan baik itu untuk pelayanan teknis perkara maupun pelayanan umum. Wujud keseriusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal

Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

PTSP tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Tinggi Yogyakarta ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk: 1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PTSP merupakan salah satu program dalam rangka peningkatan pelayanan public, memangkas birokrasi pelayanan dan sebagai upaya mencapai good governance/kepemerintahan yang baik.

Jenis-jenis pelayanan :

Pelayanan Kepaniteraan Pidana

Pelayanan Kepaniteraan Perdata

Pelayanan Kepaniteraan Hukum

Pelayanan Surat Masuk (Bagian Umum)

Pelayanan Kepaniteraan PHI

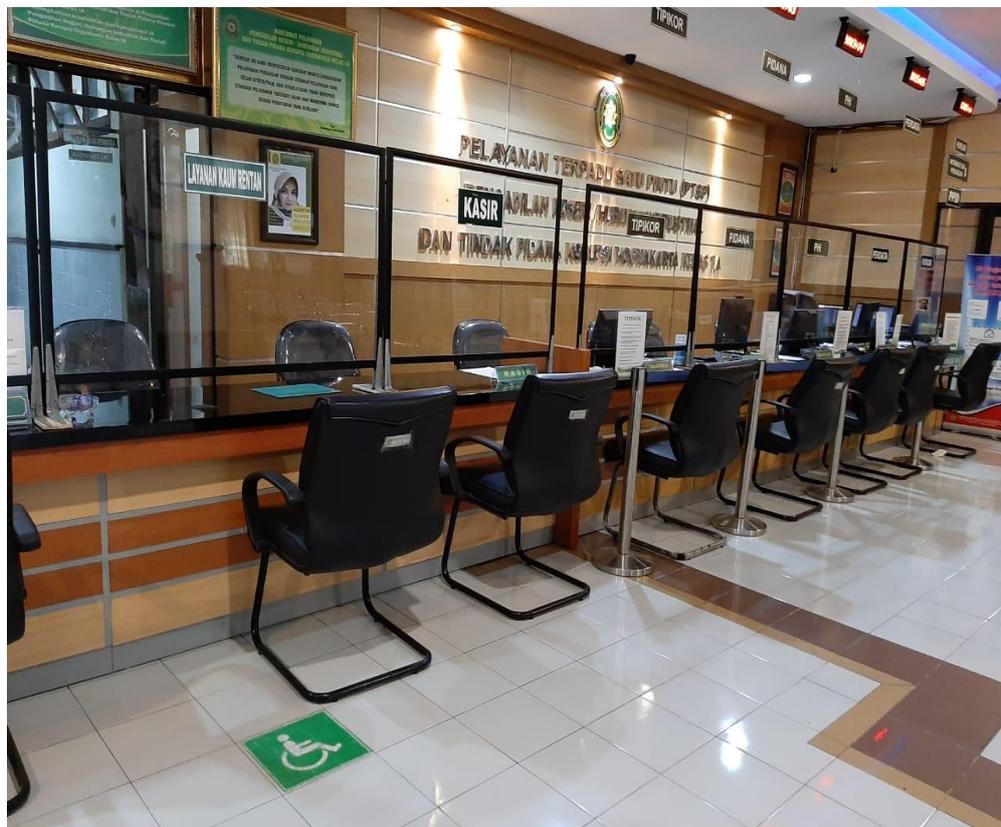
Pelayanan Kepaniteraan Tipikor

Untuk mendukung terselenggaranya Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA telah menerapkan aplikasi PTSP dari Dirjen Badilum, E-Skum, Kios-K SIPP, Antrian Sidang Elektronik, Antrian PTSP, Aplikasi IKM serta media informasi dan sosialisasi.

✓ Reformasi Regulasi :

Menyatukan pelayanan yang tersebar di beberapa kepaniteraan disatukan dalam satu pintu dan satu tempat mulai dari proses permohonan /pelimpahan perkara sampai terbitnya dokumen /selesaiannya proses (ONE STOP SERVICE)

- ✓ Reformasi Birokrasi :  
Penyederhanaan prosedur pelayanan yang lebih efisien, efektif, murah, transparan, akuntabel, menghindari biaya tinggi (penghematan) dan penyelewengan.
- ✓ Reformasi Birokrasi -> Pelayanan Publik yang Prima
- ✓ Amanat Peraturan Perundang-undangan
- ✓ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program Dirjen Badan Peradilan Umum dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan dan sebagai upaya mencapai good governance/kepemerintahan yang baik.



b. PEMBENAHAN RUANG MENJADI LEBIH TRANSPARAN NAMUN STERIL

Pemisahan ruang pelayanan administrasi (PTSP) dan ruang pelayanan persidangan, dimana telah disediakan ruang tunggu masing-masing sesuai dengan jenis layanannya. Pengunjung sudah tidak bisa masuk ke ruangan masing-masing.



### c. SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

Implementasi SNI ISO 37001 : 2016 telah dilakukan secara bertahap yang dimulai dengan penetapan Inpres No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang diikuti dengan adopsi ISO 37001 : 2016 menjadi SNI ISO 37001 : 2016 melalui Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional No.248/KEP/BSN/11/2016 pada bulan November 2016. SNI ISO 37001 dirancang bagi organisasi untuk menaati peraturan perundang-undangan serta memiliki kemampuan untuk mencegah (prevent), mendeteksi (detect), dan menangani (respond) terjadinya tindak pidana suap dengan berdasar pada 6 prinsip yaitu prosedur yang proporsional, komitmen pimpinan, manajemen risiko, uji kelayakan (due diligence), komunikasi yang efektif, serta monitoring dan review/evaluasi. Penerapan keenam prinsip tersebut dilakukan dalam sebuah proses yang disebut PDCA yaitu Plan, Do, Check, dan Act. SMAP mendasarkan pada 44 klausul yang menjadi kriteria SMAP yang mana dalam penerapannya di Pengadilan Negeri hanya dilakukan pada 43 klausul karena 1 klausul yaitu adanya organ lain di bawah Pengadilan Negeri tidak diterapkan dalam penilaian.

Pada tahapan penerapan SNI ISO 37001 dilakukan persiapan yang meliputi training dan gap analysis, pengembangan sistem yang meliputi pengembangan kebijakan dan pengembangan dokumentasi, implementasi yang meliputi sosialisasi dan implementasi sistem, review sistem yang meliputi audit internal, tinjauan manajemen, dan persiapan sertifikasi, serta Sertifikasi yang meliputi pemilihan lembaga sertifikasi, pelaksanaan audit, perbaikan hasil audit, dan keputusan sertifikasi. Pengadilan negeri yang diajukan sebagai pilot project saat itu diminta untuk melakukan bribery assement terhadap titik-titik rawan suap serta membuat program kerja untuk mengawasi titik-titik rawan suap tersebut. Dalam penerapannya, sistem yang telah ada dalam rangka melakukan pencegahan, pendeteksian, dan penindakan atas perilaku suap disinergikan dalam rangka pengendalian suap dan gratifikasi serta penanganan atas pelanggaran yang terjadi. Terhadap sistem yang telah terbangun dan mendapatkan akreditasi maka akan dilakuykan surveillance pada setiap 1 tahun dan jika ditemukan pelanggaran maka sertifikat SNI ISO 37001 : 2016 bisa dicabut.

5. KERJASAMA PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BERHADAPAN HUKUM DENGAN DINAS PMPPA (PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA)

- ✓ Kerjasama penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak berhadapan hukum.
- ✓ Mou antara Pemkot Yogyakarta, Peradi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditandatangani tanggal 29 Maret 2018 dan diperpanjang setiap tahun.
- ✓ Pengadilan Negeri Yogyakarta mendukung terwujudnya Yogyakarta menjadi Kota Layak Anak.
- ✓ Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mempersiapkan sejumlah prasarana yang disiapkan seperti ruang sidang anak, ruang tahanan ramah anak, ruang anak tidak ditahan, ruang untuk anak sebagai korban, ruang tahanan untuk perempuan, ruang teleconference, ruang tunggu Bapas/Peksos, Pojok Baca, Klinik Kesehatan, Ruang Pengasuhan Anak dan lain-lain.
- ✓ Pemkot Yogyakarta memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak yang berhadapan hukum di Kota Yogyakarta.

6. KERJASAMA PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DENGAN LSM RIFKA ANNISA

- ✓ Kerjasama Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan LSM Rifka Annisa tertanggal 13 Maret 2018 diperpanjang setiap tahun.
- ✓ Pendampingan psikologi anak yang berhadapan dengan hukum.
- ✓ Pendampingan psikososial dan atau bimbingan konseling terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum
- ✓ Pemberian layanan konseling laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari upaya menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis Gender.

7. PENANDATANGANAN MOU PENANGANAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KEPADA PEREMPUAN DAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

- Kerjasama Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan LSM SAPDA sejak 12 Juli 2018 diperpanjang setiap tahun.
- Pendampingan psikososial dan proses pemulihan perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- Asistensi dan dukungan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta menjadi pengadilan yang aksesibel terhadap kaum disabilitas
- Peningkatan sarana prasarana untuk kaum disabilitas.

#### 8. KERJASAMA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA

- Sebagai landasan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Kota Yogyakarta .
- Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya para pihak dalam meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap hukum.
- Mou antara Pemkot Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditandatangani tanggal 6 September 2018 dan diperpanjang setiap tahun.
- Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kerjasama di bidang hukum, integrasi data dan pelayanan terpadu.
- Kerjasama ini merupakan dasar untuk dijadikan sebagai dasar hukum untuk perjanjian kerjasama dengan SKPD dilingkungan Pemkot Yogyakarta.

#### 9. KERJASAMA PENINGKATAN PELAYANAN TERPADU IDENTITAS HUKUM BAGI MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA.

- Kesepakatan ini bermaksud untuk meningkatkan efektifitas, koordinasi dan kerjasama para pihak dalam pelayanan kepemilikan status hukum, kepemilikan hukum bagi masyarakat kota yogyakarta. Kesepakatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh status hukum dan identitas hukum secara mudah, cepat dan biaya ringan. Memudahkan masyarakat dalam memenuhi identitas hukum dalam melakukan perbuatan hukum di masyarakat dengan pelaksanaan pelayanan terpadu. Untuk mensinergikan program peran masing-masing pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mewujudkan status hukum dan identitas hukum bagi masyarakat kota yogyakarta. Memudahkan pelaporan data perkara yang diputuskan / ditetapkan

oleh pengadilan Negeri Yogyakarta ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta secara cepat dan akurat setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 25 Oktober 2018 dan diperpanjang setiap tahun.

#### 10. KERJASAMA SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU (SPPT)

- Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Rumah Tahanan Klas II Yogyakarta.
- Maksud dan tujuan kerjasama tersebut adalah :
  - Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia para pihak dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
  - Optimalisasi fungsi koordinasi antara Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dan Rumah Tahanan Klas II Yogyakarta
  - Menciptakan sistem peradilan pidana terpadu dalam memanfaatkan teknologi.
  - Mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang berlaku.
- Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi kegiatan penyuluhan hukum, kerjasama di bidang hukum, pelayanan sidang terpadu dan sistem peradilan pidana terpadu agar masyarakat taat terhadap hukum yang berlaku.

#### 11. PERJANJIAN KERJASAMA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DENGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAN DEWAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

- ✓ Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta dan Dewan Pimpinan Cabang Kota Yogyakarta ditandatangani tanggal 29 Maret 2018 dan diperpanjang setiap tahun.

- ✓ Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama para pihak dalam melaksanakan program kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
- ✓ Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama para pihak dalam penyelenggaraan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.
- ✓ Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kerjasama di bidang hukum, sosialisasi, pendidikan hukum dan pemberian bantuan hukum pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

**12. KESEPAKATAN KERJASAMA KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DENGAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA, KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B YOGYAKARTA, KEPALA RUMAH TAHANAN KELAS II A YOGYAKARTA TENTANG PELAKSANAAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK / TELECONFERENCE**

- Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Rumah Tahanan Klas II Yogyakarta, Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II B Yogyakarta tanggal 1 April 2021 dan diperpanjang setiap tahun.
- Maksud dan tujuan kerjasama tersebut adalah : untuk tetap terselenggaranya persidangan perkara pidana dan dalam rangka mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2020 (COVID-19) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu dengan persidangan secara elektronik / teleconference.
- Optimalisasi fungsi koordinasi antara Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Rumah Tahanan Klas II Yogyakarta, Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II B
- Menciptakan sistem peradilan pidana terpadu dalam memanfaatkan teknologi.
- Mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang berlaku.

**13. KESEPAKATAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DENGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA, DAN KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TERDAKWA DAN TERPIDANA TERKAIT DENGAN PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19**

- ✓ Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 23 Juli 2021 dan diperpanjang selama pandemic.
- ✓ Maksud kerjasama tersebut adalah : melakukan sinergi dalam rangka pelayanan kesehatan dalam rangka mencegah penularan covid-19 kepada terdakwa dan terpidana. Tujuan kerjasama ini adalah melakukan pencegahan penyebaran covid-19 di Kota Yogyakarta.
- ✓ Rung lingkup : penataan mobilisasi terdakwa dan terpidana, penatalaksanaan pengamanan terdakwa dan terpidana, penyelenggaraan rapid diagnostic test (RDT), penyelenggaraan RT-PCR bagi terdakwa/terpidana reaktif, penyelenggaraan isolasi bagi terpidana / terdakwa positif

**PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA SEBAGAI PENGADILAN PENDIDIKAN**

Pengadilan Pendidikan adalah pengadilan yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan masyarakat secara terpadu dalam bidang pendidikan semua disiplin ilmu, khususnya hukum / peradilan dan secara multiprofesi.

Latar belakang dibentuknya :

1. Kota Yogyakarta adalah kota pendidikan, sebagian besar penduduknya adalah pelajar dan mahasiswa
2. Banyaknya permohonan Informasi Akademis di Pengadilan Negeri Yogyakarta
3. Banyaknya praktik siding, dan magang di Pengadilan Negeri Yogyakarta





**14. PERJANJIAN KERJASAMA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DENGAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN (UAD) TENTANG PROGRAM KULIAH LAPANGAN (FIELD STUDY) DAN PENELITIAN MAHASISWA PADA LAYANAN PENGASUHAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

- ✓ Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditandatangani tanggal 14 Juli 2015 yang diperpanjang setiap tahun.
- ✓ Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam bidang Psikologi yaitu Penyelenggaraan Program Kuliah Lapangan dan Penelitian Mahasiswa pada Layanan Pengasuhan Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan (UAD), khususnya dalam pengembangan dan pelaksanaan Mata Kuliah Lapangan (Field Study).
- ✓ Para Pihak setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka Program Kuliah Lapangan dan Penelitian Mahasiswa Pada Layanan Pengasuhan Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta, khususnya pendampingan anak yang orangtuanya sedang beraktifitas atau berperkara (pengguna layanan) di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Mahasiswa melakukan praktik kuliah lapangan, penelitian atau melaksanakan pelayanan konsultasi dan pengasuhan anak pada layanan pengasuhan anak yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- ✓ Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing pihak, secara bersama-sama melaksanakan kerjasama ini, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak baik di tempat Pihak Kesatu maupun di tempat Pihak Kedua.

**15. KERJASAMA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN HUKUM DENGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

- ✓ Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditandatangani tanggal 27 September 2018 yang diperpanjang setiap tahun.
- ✓ Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam bidang kemahiran hukum kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, khususnya dalam pengembangan dan pelaksanaan Mata Kuliah Pemagangan.

- ✓ Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing pihak, secara bersama-sama melaksanakan pendidikan atau perkuliahan Mata Kuliah Pemagangan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak baik di tempat Pihak Kesatu maupun di tempat Pihak Kedua.

**16. PERJANJIAN KERJASAMA PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) DAN TUGAS AKHIR (TA) BAGI MAHASISWA AKADEMI AKUNTANSI YKPN YOGYAKARTA DENGAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

- ✓ Perjanjian Kerjasama Antara Akademi Akuntansi Ykpn Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditandatangani tanggal 30 Oktober 2020 yang diperpanjang setiap tahun.
- ✓ Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam bidang Ekonomi Akuntansi yaitu Penyelenggaraan Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) (Field Study).
- ✓ Para Pihak setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka Program Kerja Lapangan dan Penelitian Mahasiswa dan penyediaan informasi tentang praktik akuntansi tertentu atau informasi yang berhubungan dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan perusahaan, yang menjadi peminatan bahan kajian mahasiswa dalam penulisan Tugas Akhir.
- ✓ Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing pihak, secara bersama-sama melaksanakan kerjasama ini, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak baik di tempat Pihak Kesatu maupun di tempat Pihak Kedua.

**17. KERJASAMA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DENGAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT MAHASISWA.**

- ✓ Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditandatangani tanggal 15 Oktober 2020 yang diperpanjang setiap tahun.

- ✓ Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya dalam pengembangan dan pelaksanaan Mata Kuliah Praktik Peradilan oleh mahasiswa termasuk didalamnya pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk kepentingan kerjasama tersebut.
- ✓ Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing pihak, secara bersama-sama melaksanakan pendidikan atau perkuliahan Mata Kuliah Monitoring Persidangan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak baik di tempat Pihak Kesatu maupun di tempat Pihak Kedua.

**18. KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN TENTANG KERJASAMA KEGIATAN DI BIDANG PENDIDIKAN.**

- ✓ Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditandatangani tanggal 25 November 2020 yang diperpanjang setiap tahun.
- ✓ Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam bidang Hukum yaitu Penyelenggaraan Program Kuliah Praktik Peradilan / Persidangan kepada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD).
- ✓ Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing pihak, secara bersama-sama melaksanakan kerjasama ini, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak baik di tempat Pihak Kesatu maupun di tempat Pihak Kedua.

**19. PERJANJIAN KERJASAMA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DENGAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PELAKSANAAN MONITORING PERSIDANGAN.**

- ✓ Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditandatangani tanggal 15 Oktober 2020 yang diperpanjang setiap tahun.

- ✓ Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam bidang kemahiran hukum yaitu Monitoring Persidangan kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya dalam pengembangan dan pelaksanaan Mata Kuliah Praktik Peradilan.
- ✓ Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing pihak, secara bersama-sama melaksanakan pendidikan atau perkuliahan Mata Kuliah Monitoring Persidangan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak baik di tempat Pihak Kesatu maupun di tempat Pihak Kedua.

#### 20. PERJANJIAN KERJASAMA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GAJAH MADA YOGYAKARTA

- ✓ Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditandatangani tanggal 5 September 2020 yang diperpanjang setiap tahun.
- ✓ Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam bidang kemahiran hukum yaitu Pendidikan, penelitian dan Magang kepada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- ✓ Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing pihak, secara bersama-sama melaksanakan pendidikan atau perkuliahan Mata Kuliah Monitoring Persidangan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak baik di tempat Pihak Kesatu maupun di tempat Pihak Kedua.

## II. INOVASI PELAYANAN

### 1. MEMBUAT STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Berbicara tentang pelayanan publik, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

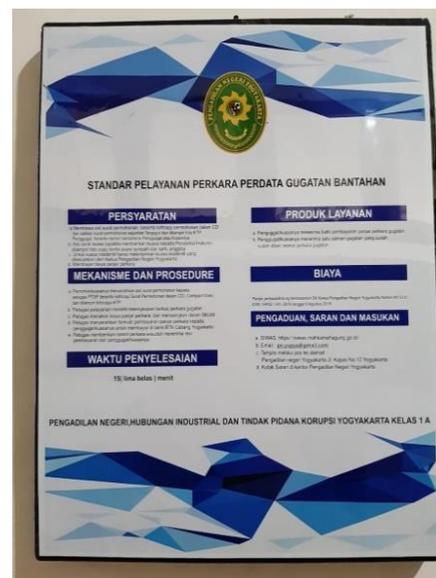
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik yang memiliki 4 tujuan, yakni memberikan batasan dan hubungan yang jelas terkait hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik yang berasaskan pemerintahan dan korporasi yang baik, terpenuhinya pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelayanan publik. Lebih rinci lagi, Undang-Undang tersebut mengatur hak dan kewajiban baik penyelenggara maupun pengguna pelayanan publik. Setidaknya ada 12 kewajiban penyelenggara dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan.

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik tentunya memberikan arahan kepada seluruh penyelenggara pelayanan baik penyelenggara negara, BUMN, BUMD, BHMN hingga swasta maupun persorangan menyelenggarakan pelayanan yang terstandarisasi dengan memenuhi komponen standar pelayanan.

Setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memenuhi 14 komponen standar pelayanan yang meliputi : 1) dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan; 2) persyaratan, syarat yang harus dipenuhi

dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif; 3) sistem, mekanisme dan prosedur, tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan; 4) jangka waktu penyelesaian, jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan; 5) biaya/tarif, ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat; 6) produk pelayanan, hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 7) sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas bagi kelompok rentan; 8) kompetensi pelaksana, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman; 9) pengawasan internal, pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana; 10) penanganan pengaduan, saran, dan masukan, tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya; 11) jumlah pelaksana, tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja; 12) jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; 13) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan; dan 14) evaluasi kinerja pelaksanaan, penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai standar pelayanan.

Saat ini Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mempunyai standart pelayanan, namun sedang direview disesuaikan dengan pemenuhan 14 komponen tersebut dan disesuaikan dengan perkembangan regulasi yang ada.





## 2. COWORKING SPACE DAN MEDIA CENTER PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Fasilitas ruang publik yang dapat dipergunakan untuk bekerja oleh mereka yang berkunjung ke pengadilan tersebut, dimana terdapat beberapa meja dan kursi layaknya di sebuah café. Fasilitas yang disediakan berupa stopkontak untuk mengisi daya listrik ke laptop maupun telepon genggam, free wifi. Di pojok kiri ruangan terdapat pajangan berbagai plakat yang diraih PN Yogyakarta terutama berkaitan dengan pencegahan korupsi dan gratifikasi. Sementara di sebelah kanannya terdapat kantin kejujuran/honesty coffeeshop dengan menu teh dan kopi lengkap dengan persediaan air panas, sehingga yang ingin bekerja sambil menikmati minuman hangat tinggal membeli dan menyeduhnya langsung di tempat.

Perkembangan peradilan yang mengarah kepada sistem peradilan elektronik. Meski telah disediakan pojok e-court (e-court corner), para advokat masih mungkin untuk berfikir menyelesaikan pekerjaannya terkait e-court di pengadilan.

Ruangan tersebut akan menjadi fasilitas lain untuk mendukung terlaksananya sistem peradilan elektronik dengan lebih baik. Jika e-court corner dimaksudkan untuk melayani pengguna terdaftar dan pengguna lain yang baru mendaftar, fasilitas ini justeru untuk selama proses persidangan secara elektronik.

### Ruangan Multifungsi

Ruangan tersebut bukan hanya untuk bekerja para mitra pengadilan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai media center dan ruang pertemuan. Bilamana terdapat perkara-perkara yang menarik perhatian publik, bagian Humas Pengadilan akan mempersiapkan press release dan memberikan keterangan pers di ruangan tersebut. Hal tersebut akan

terasa lebih baik ketimbang para awak media mendapatkan informasi di sembarang tempat atau dari sumber-sumber yang tidak jelas.

Dan jika ada mahasiswa yang melakukan penelitian atau membutuhkan penjelasan secara klasikal, ruangan tersebut dapat dimanfaatkan, karena Yogyakarta adalah kota pendidikan, banyak mahasiswa yang datang untuk observasi maupun penelitian. Mahasiswa atau peneliti dapat menggunakan fasilitas ini untuk mengerjakan tugas-tugasnya tanpa harus membuang-buang waktu ke tempat lain.



## CO-WORKING SPACE

### MEDIA CENTER UNTUK PERSS CONFERENCE

### KAPAS-10 CO-WORKING SPACE

Workspace for the Modern Professional

**MEDIA CENTER PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

**ITU APA SIH??**

KAPAS-10 CO-WORKING SPACE merupakan co-working space yang dimiliki Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dapat digunakan pengguna layanan profesional seperti Advokat / Penasehat Hukum, Aparat Kepolisian, Aparat Kejaksaan, Lapas / Rutan, Bapas, Para Pihak dan Mahasiswa sehingga selama menunggu pelayanan masih dapat bekerja.

**APA KEUNTUNGAN MENGGUNAKAN KAPAS-10 CO-WORKING SPACE**

- Menghindari useless time
- Bebas menyelesaikan project atau pekerjaan di co-working space
- Networking dengan komunitas penasehat hukum atau pengguna layanan
- Upgrade skill
- Ngopi santuyyy...
- Free Wifi

**SIAPA SAJA YANG BOLEH MENGGUNAKAN?**

Jika kamu adalah pengguna layanan Pengadilan Negeri Yogyakarta, baik persidangan maupun PTSP, pas banget nih, kamu bisa memanfaatkan Kapas-10 co-working space ihoo!!

**FASILITAS**

- Co-working Space
- Meeting Room : sebagai tempat temu partners / klien maupun sharing knowledge
- Media center : publikasi program Pengadilan Negeri Yogyakarta
- Free wifi
- Honesty Coffee Shop

**RULE / PERATURAN**

- Jujur
- Silent ponsel / gadget
- Tenang / berbicara pelan
- Sopan
- Jaga kebersihan
- Bersahabat

[www.pn-yogyakarta.go.id](http://www.pn-yogyakarta.go.id)

## 1. PENGUATAN ANTI KORUPSI DAN ANTI SUAP DENGAN HIMBAUAN



## 2. PHOTOBOTH



Photoboth untuk masyarakat / pengguna layanan Pengadilan Negeri Yogyakarta telah disediakan meskipun sederhana dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, dan

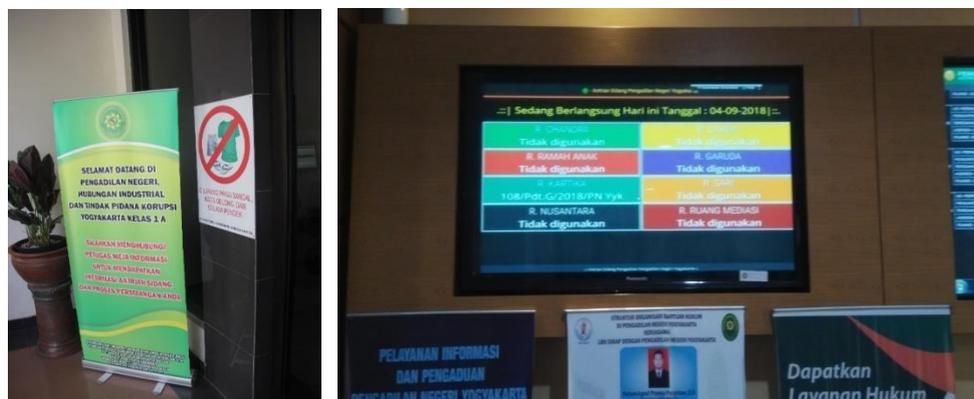
menampilkan pencapaian-pencapaian yang telah diraih Pengadilan Negeri Yogyakarta beserta piagam / komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta

Photoboth dibuat dengan maksud agar mendekatkan pengadilan dengan masyarakat. Pengadilan tidak lagi menjadi tempat orang bermasalah, “serem & ngeri” tetapi lebih “hommy”.

### III. INOVASI SISTEM

#### Pembenahan dan Penyempurnaan Teknologi Informatika

##### 1. ANTRIAN SIDANG dan ANTRIAN PTSP

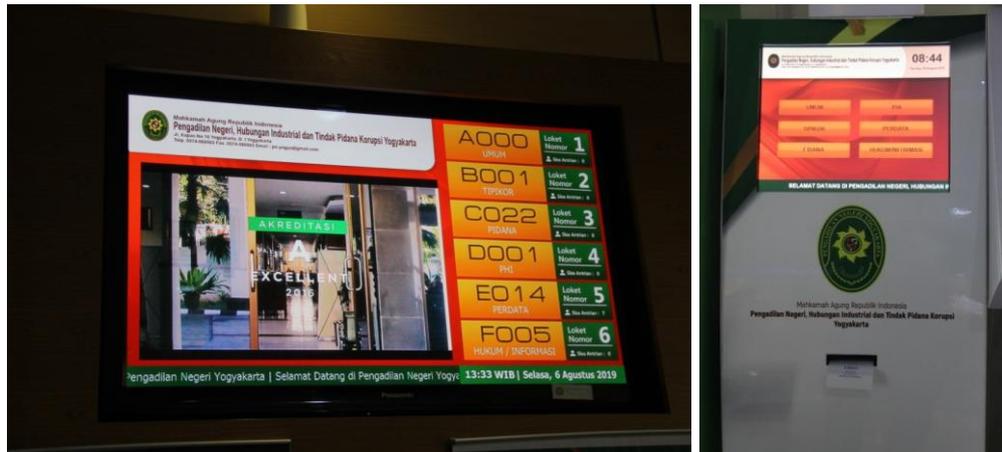


Antrian Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah layanan kepada Pencari Keadilan dimana Para Pihak yang berperkara akan dipanggil dan disebut nama pihak untuk memasuki ruang sidang dengan sistem yang sudah terkoneksi dengan Aplikasi Absensi Pihak (Roll Sidang) di Meja Informasi dan Terkoneksi dengan data perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Aplikasi ini berdasarkan kedatangan dan kelengkapan para pihak, yaitu dengan cara para pihak melaporkan kedatangan ke meja informasi. Para pihak yang sudah lengkap akan disidangkan terlebih dahulu, disamping itu masyarakat dapat mengetahui persidangan suatu perkara berkaitan dengan ruang sidang, status persidangan atau sudah selesai sidang.

Pemanggilan Pihak dapat dilakukan dengan menggunakan Personal Komputer, Laptop atau Handphone Android.

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan adanya peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Yogyakarta.



## 2. APLIKASI TRANSKRIP PERSIDANGAN

Aplikasi Transkrip Persidangan (ATP) adalah sebuah inovasi aplikasi peradilan yang dibuat untuk merubah proses administratif peradilan dari konvensional menjadi berbasis teknologi informasi.

Cara kerja ATP (Aplikasi Transkrip Persidangan) yaitu pengenalan suara pembicara dan dikonversi dalam bentuk text didalam komputer

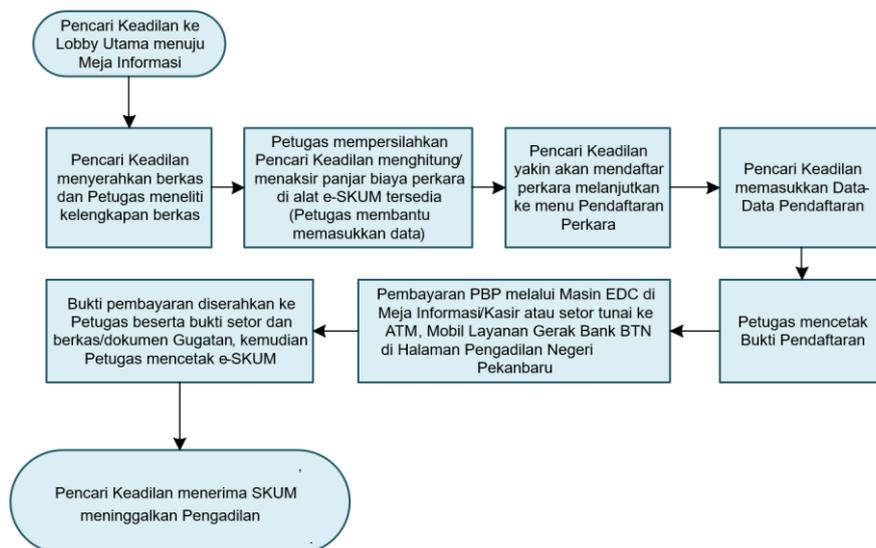
Terdiri dari beberapa panel yang ditampilkan, dan pembicara dalam ruang sidang dapat berbicara bersamaan sekaligus.



### 3. E-SKUM

e-SKUM adalah Sistem Aplikasi Menghitung Sendiri Panjar Biaya Perkara yang dilakukan oleh Para Pencari Keadilan di Lobby Utama dengan menggunakan alat e-SKUM.

Maksud dan Tujuan dalam penerapan Sistem Aplikasi e-SKUM adalah untuk memberikan pelayanan terbaik serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan akhir terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik di pengadilan agar pelayanan peradilan dapat terselenggara lebih cepat, sederhana dan berbiaya ringan.



#### 4. E-COURT & ERATERANG CORNER



#### 5. VOICE WARNING SYSTEM (SMAP)

**Voice Warning System SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuaan)**

Pengadilan Negeri Kabupaten Indragiri dan Takengin Kepulauan Riau No. 1  
A. dalam rangka pengoperasian Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP) atau SO 378/19, merupakan hal yang sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan atau pencari keadilan, maka diperlukan untuk bisa menghidupkan Aparatur Pengadilan baik langsung maupun tidak langsung yang dibarengi dengan berkolaborasi pada prosedur Kurasi, Kedisiplinan (KODIS).
2. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan atau pencari keadilan, maka dibutuhkan untuk bisa menghidupkan Aparatur Pengadilan baik langsung maupun tidak langsung yang dibarengi dengan berkolaborasi pada prosedur Kurasi, Kedisiplinan (KODIS).
3. Bahwa apabila terdapat Aparatur Pengadilan yang memiliki sesuatu behavior dalam pelayanan yang diberikan dan melanggar prosedur, maka langsung diminta hal tersebut dibarengi dengan ketentuan sebagai berikut, maka hal tersebut dapat dipaparkan ke:
  - a. Kepala Pengadilan yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta;
  - b. Email: [102.102.102@pn.yogya.go.id](mailto:102.102.102@pn.yogya.go.id);
  - c. Email: [di.unpa@pn.yogya.go.id](mailto:di.unpa@pn.yogya.go.id);
  - d. Kepala Seksi Pengadilan Negeri Yogyakarta;
  - e. Terdiri media surat ke alamat: Pengadilan Negeri Yogyakarta Jalan Kasep No. 10 Yogyakarta.

Voice Warning System SMAP(Sistem Manajemen Anti Penyuaan) diumumkan 1 jam sekali secara rutin di hari kerja.

#### 6. AUDIO GRATIFIKASI

**Audio Peringatan Anti Gratifikasi**

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019

---

**Audio Peringatan Anti Gratifikasi (per 2 jam)**

**Anti Gratifikasi (2 jam sekali)**

Peringatan ini di putar 2 jam sekali. Silahkan tekan tombol Play untuk memulai diputar dan Audio Anti Gratifikasi akan diputar setiap 2 jam sekali secara otomatis.

[▶ Play](#)

**Audio Peringatan Anti Gratifikasi Sebelum Persidangan dimulai**

**Anti Gratifikasi Sebelum Persidangan (Perempuan)**

Peringatan ini di putar sebelum persidangan dimulai. Silahkan tekan tombol Play untuk memulai diputar.

[▶ Play](#)

**Anti Gratifikasi Sebelum Persidangan (Laki-laki)**

Peringatan ini di putar sebelum persidangan dimulai. Silahkan tekan tombol Play untuk memulai diputar.

[▶ Play](#)

Audio Peringatan Anti Gratifikasi diumumkan 2 jam sekali secara rutin di hari kerja.

## 7. JOGJA SMART SERVICE

Integrasi Aplikasi Layanan Pengadilan pada Aplikasi Jogja Smart Services (JSS), kerjasama dengan Diskominfo Kota Yogyakarta

Aplikasi JSS adalah jalur tambahan untuk menginformasikan dan memberikan pelaporan kejadian kedaruratan diluar jalur pelaporan konvensional (melalui telepon). Daftar layanan Pemerintah Kota yang dapat diakses langsung oleh masyarakat dengan mengedepankan pelayanan mandiri (Swalayan) dengan Single Sign On (SSO)



## 8. MEDIA INFORMASI DIGITAL



Informasi baik berupa prosedur layanan, standart pelayanan, persyaratan, video sosialisasi dan sebagainya disajikan dengan digital dan dapat diakses dengan QR Code baik pada lingkungan pengadilan maupun pada website.

## 9. WEBSITE AKSESIBLE BUAT PENYANDANG DISABILITAS

Situs Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan. Fitur AccessKey navigasi keyboard juga ditanamkan di situs ini bagi difabel mandiri



## 10. E-Permohonan informasi akademisi

The image shows a screenshot of a web form titled 'e-Permohonan Informasi Akademisi'. The form is designed for academic information requests. It includes a header with the title and a sub-header 'PENGADILAN NEGERI ALYANAN INDUSTRIAL DAN INDAK PDANA KORPRI YOGYAKARTA KELAS IA'. The main content area contains a description of the service, its purpose, and the mechanism for requesting information. It lists the requirements: 1. Scan KTP / Kartu Identitas, 2. Scan Surat Pengantar dari Universitas, and 3. Softcopy Proposal. A note states that the user's name and photo associated with their Google account will be recorded upon upload. The form fields on the right include: 'Nama Pemohon' (text input), 'Jenis Kelamin' (radio buttons for 'Laki-laki' and 'Perempuan'), 'Nomor Whatsapp' (text input), 'Alamat' (text input), 'Nama Universitas' (text input), 'Fakultas / Jurusan' (text input), 'Judul / Tema Penelitian' (text input), and three 'Persyaratan' (Requirements) sections, each with an 'Add file' button. A 'Submit' button is located at the bottom right.

e-Permohonan Informasi Akademisi dibuat untuk memfasilitasi masyarakat khususnya para akademisi yang hendak mengajukan permohonan informasi/ penelitian pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dengan mekanisme pengisian formulir dan pelampiran softcopy kartu identitas, softcopy surat pengantar dari universitas dan proposal. Fasilitas ini diharapkan mempermudah dan meringkas proses pengajuan permohonan informasi sebagai mitigasi resiko pencegahan pandemi COVID-19.

Mekanisme : e-Permohonan Informasi Akademisi adalah layanan permohonan informasi kepada akademisi, yang diajukan melalui website dengan registrasi secara online, pihak mengupload dokumen yang dipersyaratkan, dan pihak Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta akan melakukan pengecekan dan verifikasi data, kemudian mengkonfirmasi by email dan whatsapp terkait waktu pengambilan informasi, apakah harus diambil ke Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta atau cukup melalui email.

Persyaratan :

1. Scan KTP / Kartu Identitas
2. Scan Surat Pengantar dari Universitas
3. Softcopy Proposal

## 11. E-Permohonan informasi PUBLIK



**PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**  
PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

### e-Permohonan Informasi Publik

Anda ingin mengajukan permohonan informasi???

e-Permohonan Informasi Publik hadir menjawab kebutuhan tersebut. e-Permohonan Informasi Publik dibuat untuk memfasilitasi masyarakat yang hendak mengajukan permohonan informasi/ penelitian pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dengan mekanisme pengisian formulir dan pelampiran softcopy kartu identitas, softcopy surat pengantar dari lembaga dan proposal. Fasilitas ini ini diharapkan mempermudah dan meringkas proses pengajuan permohonan informasi sebagai mitigasi resiko pencegahan pandemi COVID-19. Ikuti syarat dan mekanismenya untuk dapat menggunakan fasilitas ini.

**Mekanisme :**  
e-Permohonan Informasi Publik adalah layanan permohonan informasi kepada pengguna layanan, yang diajukan melalui website dengan registrasi secara online, pihak mengupload dokumen yang dipersyaratkan, dan pihak Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta akan melakukan pengecekan dan verifikasi data, kemudian mengkonfirmasi by email dan whatsapp terkait waktu pengambilan informasi, apakah harus diambil ke Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta atau cukup melalui email.

**Persyaratan :**

1. Scan KTP / Kartu Identitas
2. Scan Surat Pengantar dari Lembaga
3. Softcopy Proposal

The name and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form. Not [ptip.pnjogja@gmail.com](mailto:ptip.pnjogja@gmail.com)? [Switch account](#)

\* Required

**Nama Pemohon \***

Your answer

**Jenis Kelamin \***

Laki-laki  
 Perempuan

**Nomor Whatsapp \***

Your answer

**Alamat \***

Your answer

**Nama Lembaga \***

Your answer

**Maksud dan Tujuan Penggunaan Informasi \***

Your answer

**Informasi Dibutuhkan \***

Your answer

**Persyaratan (Scan KTP / Kartu Identitas) \***

[Add file](#)

**Persyaratan (Surat Pengantar dari Lembaga) \***

[Add file](#)

**Persyaratan (Proposal) \***

[Add file](#)

**Submit**

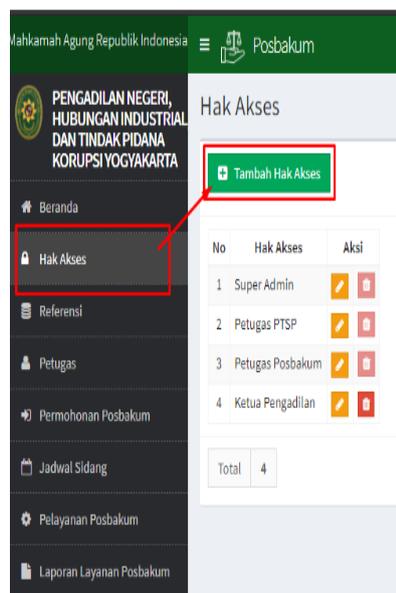
- ✓ e-Permohonan Informasi Publik hadir menjawab kebutuhan permohonan informasi. e-Permohonan Informasi Publik dibuat untuk memfasilitasi masyarakat yang hendak mengajukan permohonan informasi/ penelitian pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dengan mekanisme pengisian formulir dan pelampiran softcopy kartu identitas, softcopy surat pengantar dari lembaga dan proposal. Fasilitas ini ini diharapkan mempermudah dan meringkas proses pengajuan permohonan informasi sebagai mitigasi resiko pencegahan pandemi COVID-19.

- ✓ Mekanisme :  
e-Permohonan Informasi Publik adalah layanan permohonan informasi kepada pengguna layanan, yang diajukan melalui website dengan registrasi secara online, pihak mengupload dokumen yang dipersyaratkan, dan pihak Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta akan melakukan pengecekan dan verifikasi data, kemudian mengkonfirmasi by email dan whatsapp terkait waktu pengambilan informasi, apakah harus diambil ke Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta atau cukup melalui email.

Persyaratan :

1. Scan KTP / Kartu Identitas
2. Scan Surat Pengantar dari Lembaga
3. Softcopy Proposal

## 12. E-Posbakum



E-Posbakum adalah aplikasi yang digunakan untuk administrasi layanan Posbakum yang selama ini masih dilaksanakan secara manual.

Administrasi ini ditujukan untuk memonitoring pelaksanaan posbakum, baik dari jenis layanan, advise yang diberikan maupun jumlah pengguna layanan.

Dengan e-Posbakum ini diharapkan Panmud Hukum, Panitera, Kasub PTIP, PPK, Sekretaris maupun Ketua Pengadilan dapat memonitoring pelaksanaan Posbakum.

Adapun manfaat dari aplikasi ini adalah :

1. Bagi Panmud Hukum dan Kasub PTIP : Memudahkan dalam pelaporan.
2. Bagi PPK : monev realisasi anggaran posbakum
3. Bagi Sekretaris : monev realisasi anggaran posbakum
4. Bagi Panitera : monev pelaksanaan bantuan hukum kepada pengguna layanan agar tepat sasaran
5. Bagi Ketua : monev pelaksanaan bantuan hukum dan realisasi anggaran agar tepat sasaran

## BAB IV PENGAWASAN

### A. PENGAWASAN INTERNAL

Dalam hal Pengawasan, Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA pelaksanaan pengawasan melekat telah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris. Untuk Hakim-Hakim pelaksanaan pengawasan melekat ada pada Ketua Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA, sedangkan pada Kepaniteraan, pejabat struktural maupun tenaga fungsional lainnya dilakukan oleh Panitera untuk Kepaniteraan dan Sekretaris untuk Kesekretariatan.

Sedangkan untuk Pengawas bidang telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang. Hakim Pengawas Bidang ini membuat laporan pengawasan setiap bulan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

Untuk Pengawasan Keuangan sesuai dengan pedoman pengawasan telah dilakukan pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan pemeriksaan atas laporan realisasi APBN dan Neraca.

Adapun selama Periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022, di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA telah dilakukan Pengawasan dan Pembinaan oleh Tim:

### B. EVALUASI INTERNAL

Pada umumnya pengawasan di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA telah berjalan dengan baik, karena Pengawasan melekat telah berjalan dan dilaksanakan oleh Pimpinan dan pejabat yang bertanggung jawab.

Untuk Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang telah berjalan dengan baik, karena Pengawas Bidang telah menjalankan tugasnya untuk memberikan pengawasan dan arahan – arahan untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas selanjutnya membuat laporan kepada Ketua

Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA setiap satu bulan sekali.

Selain Pengawasan Internal, terdapat evaluasi dari Internal antara lain:

1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara keseluruhan
  - 11 Januari 2022 : Penandatanganan Pakta Intgeritas dan Rapat Pembinaan Serta Monev Kinerja Bulan Januari 2022
  - 23 Maret 2022 : Rapat Pembinaan dan Monev Kinerja Bulan Februari 2022
  - 24 April 2022 : Rapat Pembinaan dan Monev Kinerja Bulan April 2022 serta Sosialisasi Sosialisasi
  - 23 Mei 2022 : Rapat Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Bulan Mei 2022
  - 10 Juni 2022 : Rapat Pembinaan dan Monev Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Juni 2022
  - 29 Juli 2022 : Pembinaan dan Monev Kinerja Buan Juli 2022 dan Closing Meeting Assesment Internal APM dan SMAP
  - 26 Agustus 2022 : Rapat Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Bulan Agustus, Sosialisasi dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)
  - 4 November 2022 : Rapat Pembinaan dan Monev Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Bulan September 2022
  - 30 November 2022 : Rapat Pembinaan dan Monev Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Oktober 2022
  - 1 Desember 2022 : Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembinaan dan Monev Kinerja Bulan November 2022
  - 12 Desember 2022 : Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembinaan dan Monev Kinerja Bulan Desember 2022
2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyelesaian Perkara yang dilaksanakan setiap hari melalui Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja (MIS) oleh Pimpinan secara berjenjang.

3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Akreditasi Penjaminan Mutu, Zona Integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
  - 19 Januari 2022 : Opening Meeting Audit Internal Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2022
  - 27 Mei 2022 : Rapat Evaluasi Implementasi Manajemen Anti Penyuapan
  - 16 Juni 2022 : Rapat Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
  - 26 Juli 2022 : Opening Meeting Assesment Internal Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
  - 18 Agustus 2022 - Rapat Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Yogyakarta
  - 20 September 2022 : Rapat Persiapan Evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
  - 7 Oktober 2022 : rapat Koordinasi dan Evaluasi Terkait Surveillance SMAP
  - 13 Oktober : Rapat Koordinasi dan Evaluasi Terkait Surveillance SMAP
  - 26 Oktober 2022 : Rapat Evaluasi SMAP dan Pengawasan BAWAS, Pengadilan Tinggi Serta PPID
4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
  - 31 Januari 2022 : Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan
  - 11 Mei 2022 : Rapat Penyusunan DIPA Tahun 2023 , Reviu Indikator Kinerja Utama dan Dokumen SAKIP Tahun 2022 Pengadilan Negeri Yogyakarta
5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diselenggarakan pada :
  - 9 Desember 2022 : Monev Layanan POSBAKUM Pengadilan Negeri Yogyakarta
6. Monitoring dan Evaluasi PTSP
  - 21 Desember 2022 : Breafing Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

7. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Implementasi Teknologi Informasi

- 5 Januari 2022 : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kondisi Ruang Persidangan Online Pengadilan Negeri Yogyakarta
- 7 Januari 2022 : Rapat Monev Pelaksanaan Pesidangan dan Penanganan Perkara Serta Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Bidang
- 17 Mei 2022 : Rapat Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan e-Court
- 4 Juli 2022 : . Rapat Koordinasi Pembuatan Video Profil Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- 12 Juli 2022 : Rapat Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Implementasi Aplikasi e-Berpadu
- 13 Juli 2022 : Rapat Monev Pelaksanaan Implementasi Aplikasi e-Berpadu
- 14 Juli 2022 : Rapat Monev Pelaksanaan Implementasi Aplikasi e-Berpadu
- 15 juli 2022 : Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Implementasi Aplikasi e-Berpadu Bersama Pengadilan Negeri Yogyakarta
- 20 September 2022 : Sosialisasi Gugatan Sederhana dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan e-Court
- 14 November 2022 : Rapat Koordinasi Teknis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu)

8. Monitoring Kedisiplinan Pegawai dilakukan setiap bulan dan waktu-waktu tertentu :

- 7 Februari 2022 : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Mutasi Internal Tenaga Teknis
- 23 agustus 2022 Rapat Monitoring dan Evaluasi Kedisiplinan Pengadilan Negeri Yogyakarta
- 26 Agustus 2022 : . Rapat Monitoring dan Evaluasi Kedisiplinan Pengadilan Negeri Yogyakarta

9. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

- 8 Juni 2022 : Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal 2024
- 6 Desember 2022 : Rapat Rencana Penganggaran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dan Prodeo

#### 10. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Eksekusi

- 3 Agustus 2022 - Rapat Monitoring Evaluasi Permohonan Eksekusi Perkara Perdata
- 3 November 2022 : Rapat Monitoring dan Evaluasi Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata

#### 11. Monitoring dan Evaluasi Administrasi Perkara

- 25 Januari 2022 : Monitoring dan Evaluasi Penentuan Panjar Biaya Perkara Tahun 2022

#### C. EVALUASI EKSTERNAL

1. Pengawasan dan Monitoring Evaluasi SIPP oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta 1 Juli 2022
2. Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu oleh TAPM Badilum MA RI tanggal 6 – 10 September 2022
3. Monitoring Pelaksanaan DIPA 03 tanggal 03 – 05 Oktober 2022
4. Evaluasi SMAP oleh Badan Pengawasan MA RI tanggal 11-14 Oktober 2022
5. Pemeriksaan regular oleh Badan Pengawasan MA RI tanggal 17 – 21 Oktober 2022
6. Pengawasan Daerah oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 24-25 Oktober 2022
7. Penilaian PIPK : 22 – 25 November 2022

## BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pelaksanaan keseluruhan program Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2022, maka dapat disimpulkan :

1. Secara umum seluruh program dan kegiatan telah dapat dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat beberapa hambatan.
2. Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan baik antara pegawai, pejabat struktural, pejabat teknis belum optimal sehingga masih banyak kekurangan baik dalam pengelolaan sarana prasarana, anggaran, penyelesaian perkara maupun pelayanan publik.
3. Program-program yang sudah ada telah dipelihara dan ditingkatkan dengan pengembangan program-program baru yang mendukung peningkatan pelayanan publik.
4. Konsistensi pelaksanaan kegiatan maupun program-program berdasarkan perencanaan, juklak, juknis maupun peraturan yang ada sangat bergantung pada SDM dan Anggaran.
5. Komitmen pimpinan dan komunikasi internal sangat berpengaruh terhadap suksesnya suatu program.

### B. REKOMENDASI :

Menghadapi pelaksanaan program Tahun 2023, dan berangkat dari pelaksanaan kegiatan Tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan setiap bidang perlu direview dan disesuaikan dengan tupoksi sehingga tidak terjadi tumpang tindih penanganan program dan kegiatan.
2. Penunjukan personil/pegawai pada setiap kegiatan perlu memperhatikan tingkat kompetensi, dedikasi, tanggungjawab terhadap pelaksanaan setiap program dan kegiatan.
3. Koordinasi perlu dilakukan lebih intensif antara seluruh komponen pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Dukungan sarana prasarana, anggaran dan peningkatan kompetensi melalui bimbingan teknis sangat perlu direncanakan dan direalisasikan.
5. Program-program yang telah berjalan agar ditingkatkan dan dipelihara.